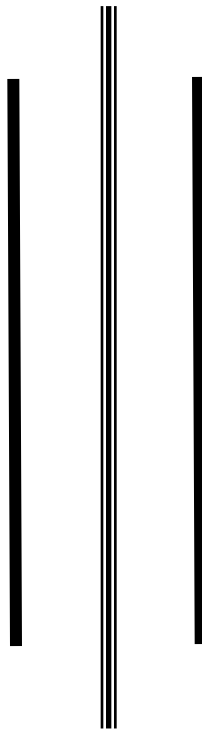


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR SAMPANG



RENCANA KERJA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2025



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG
NOMOR: KEP/ 14 / I /2025, 31 JANUARI 2025



DAFTAR ISI

	Halaman
Keputusan Kapolres Sampang	-
I LATAR BELAKANG	
1. Kondisi Umum	1
a. Perkembangan Aspek Kehidupan masyarakat	9
b. Analisis SWOT	28
2. Identifikasi Masalah	37
II TUJUAN DAN SASARAN	
1. Visi dan Misi Polda Jatim.....	40
2. Visi dan Misi Polres Sampang.....	40
3. Tujuan.....	41
a. Polda Jatim.....	41
b. Polres Sampang.....	41
4. Sasaran Strategis.....	42
a. Polda Jatim.....	42
b. Polres Sampang.....	43
III KEBIJAKAN PRIORITAS TAHUN 2025 UNTUK MENGATASI MASALAH DI DAERAH KAB SAMPANG	45
1. Arah Kebijakan Polda Jatim.....	
2. Arah Kebijakan Polres Sampang.....	68
IV PROGRAM KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025	74
1. Program dan kegiatan	
2. Pagu Indikatif.....	75
BAB V PENUTUP	78
V Penutup.....	





KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG

Nomor: Kep/ 14 /I/2025

tentang

RENCANA KERJA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG TA 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Polres Sampang TA 2025 maka dipandang perlu menetapkan keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

8. Peraturan.....



8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
9. Rancangan Rencana Kerja (Rarenja) Polres Sampang TA 2025;
10. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Sampang TA 2023;
11. Kalender Kamtibmas TA 2025;
12. Perkiraan Intelijen Polres Sampang tahun 2025 tanggal 1 Desember 2024.

- Memperhatikan:
1. Keputusan Kepala Kepolisian Resor Sampang Nomor: Kep/ 27/V/2023 tanggal 13 Mei 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Polres Sampang TA 2024;
 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2024-2029;
 3. Peraturan Bupati Sampang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang Tahun 2025;
 4. Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

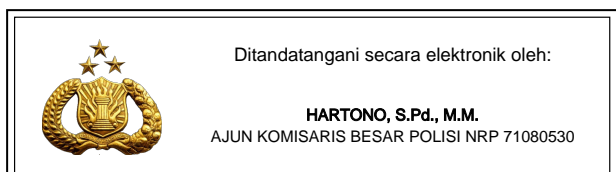
- Menetapkan :
1. Mengesahkan Rencana Kerja Polres Sampang TA 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 2. Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Sampang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing satuan kerja;
 3. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sampang
pada tanggal: 31 Januari 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG POLDA JATIM

Tembusan:

1. Kapolda Jatim.
2. Irwasda Polda Jatim.
3. Karorena Polda Jatim





RENCANA KERJA
KEPOLISIAN RESOR SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
LATAR BELAKANG

I. Kondisi Umum

1. Polda Jatim

Pada Tahun 2023 Pembangunan stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan termasuk transformasi pelayanan publik menunjukkan keberhasilan pada indikator pembangunan yang mengalami perbaikan positif, yaitu (1) Indeks Demokrasi Indonesia dari 78,12 pada tahun 2021 menjadi 79,51 pada tahun 2023; dan (2) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap akses informasi public terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah dari 77,23 persen pada tahun 2021 menjadi 85,50 persen pada tahun 2023.

Pada tataran pemerintah, diperlukan perumusan kebijakan yang komprehensif dan strategi implementasi yang terukur dan terintegrasi. Hal ini mencakup pengembangan dan perluasan infrastruktur digital yang kokoh, literasi digital, perlindungan data pribadi dan peningkatan keamanan siber, perlindungan data pribadi dan peningkatan keamanan siber, regulasi yang mendukung ruang digital yang kondusif, termasuk di dalamnya bagi kelompok rentan, anak-anak, dan perempuan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu, adopsi teknologi digital juga memiliki peran penting dalam menginovasi solusi digital untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kerja sama multistakeholder dan pendekatan lintas sektor harus dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan setiap sektor untuk memastikan inklusivitas dan keberlanjutan transformasi digital.

Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan, dilaksanakan melalui :

- (a) penguatan pertahanan negara;
- (b) pembangunandan pengembangan industri pertahanan;
- (c) penguatan sistem keamanan negara;

(d) profesionalisme.....



- (d) profesionalisme pelayanan kepolisian;
- (e) penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi;
- (f) keamanan siber, sandi, dan sinyal;
- (g) penguatan infrastruktur dan jejaring smart diplomacy;
- (h) diplomasi ekonomi; dan
- (i) hubungan internasional yang kondusif.

Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 2019-2024 telah membuahkan hasil yang diharapkan, akan tetapi untuk pembangunan kedepan masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan. Berbagai permasalahan yang dihadapi Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang terjadi sebagai dampak interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor baik pada skala lokal kabupaten/kota, provinsi, nasional maupun global. Permasalahan-permasalahan tersebut timbul karena kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, adanya kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Jatim resmi meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Salah satu cita-cita besar dalam RPJPN tersebut adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mewujudkan Indonesia emas di 2045. Dalam mewujudkan cita-cita Indonesia emas di 2045, Jawa Timur akan melakukan berbagai upaya. Seperti peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, dari segi fisik, skill, karakter, produktivitas, disiplin. Ada tiga hal pokok yang menjadi acuan. Diantaranya adalah stabilitas bangsa yang terjaga, adanya keberlanjutan dan kesinambungan dan peningkatan kualitas SDM. Kemudian fokus pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan kualitas SDM adalah langkah awal yang harus dimiliki setiap komponen bangsa.

Setiap Kementrian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan Kementrian/Lembaga sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional, perencanaan pembangunan Kementrian/Lembaga diselenggarakan oleh seluruh perangkat yang berada dibawah Kementrian/Lembaga yang membidangi perencanaan pembangunan serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Kementrian/Lembaga dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan wilayah dan nasional.



Dokumen perencanaan di tingkat Kementrian/Lembaga adalah Rencana strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima Tahun yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran Pembangunan Nasional. Renja merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan Kementrian/Lembaga yang disusun periode satu Tahun yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah yang juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Tahun 2025 merupakan tahun ke-1 (satu) dari Tahapan Rencana Strategis Polda Jatim Tahun 2025-2029 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polda Jatim T.A. 2024, sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polda Jatim T.A. 2025. Rencana Kerja Polda Jatim T.A. 2025 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Polri Tahun 2025-2029. Rencana Kerja Polda Jatim T.A. 2025 disusun dengan memperhatikan Rancangan Akhir RPJMN 2025-2029, yaitu:

- 1) pilar Penguatan Keamanan Dalam Negeri, Penguatan Intelijen, dan Penanggulangan Terorisme;
- (2) pilar Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebagai “*Safe Guarding*” penuntasan target prioritas nasional RPJMN 2025-2029 mengingat tahun 2025 adalah tahun pertama dari masa transisi serta dimulainya pemikiran RPJMN sebagai kelanjutan dari *road map* Visi Indonesia 2025-2045.

Penyusunan Renja Polda Jatim T.A. 2025 ini disusun dengan maksud sebagai bentuk penjabaran visi dan misi Polda Jatim dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh Kapolri untuk mencapai program, kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Renja Polda Jatim serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup baik dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Seluruh keberhasilan Polri dalam pengungkapan kasus-kasus khususnya tindak pidana terorisme, Siber, Narkoba, Korupsi maupun kejahatan transnasional lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif dari masyarakat serta dari dalam maupun luar negeri sehingga dapat mendukung kelancaran pembangunan nasional walaupun masih ditemukan adanya komplain masyarakat terkait pelayanan publik Polri. Keberhasilan yang dicapai oleh Polri tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri dengan didukung oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan partisipasi.

masyarakat



masyarakat serta berbagai *stakeholders* yang terkait dengan tugas kepolisian. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik terhadap kinerja Polri oleh pemerintah/swasta/masyarakat akan dijadikan tantangan bagi Polri dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang.

Keberhasilan yang diraih Polri diharapkan dapat membuat Polri semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polri untuk dapat senantiasa terus- menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang kepolisian. Tantangan dan harapan masyarakat serta pemerintah kepada Polri yaitu:

1. Polri yang semakin profesional, cerdas, berintegritas, transparan, adil, dan humanis namun tegas, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang “*Presisi*”;
2. menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan dan PPKT dalam rangka mengantisipasi ambang gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaan anggota Polri dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman;
3. menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur, adil, legal dan humanis serta setara (*equality before the law*), terhadap gangguan nyata serta mewujudkan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana;
4. meningkatnya fungsi dan peran intelijen yang mampu mendeteksi, mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas.

Lingkungan strategis baik global, regional dan nasional sangat mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polri. Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks, di mana dunia menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat. Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai yang saling mempengaruhi dan budaya bangsa yang positif berpotensi bisa berubah menjadi perilaku negatif seperti masih ditemukannya: eksklusifisme, materialisme, konsumerisme, hedonisme dan radikalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti: demokratisasi, paham radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang, perjudian, kejahatan siber, penyelundupan manusia, Narkoba, penyelundupan senjata dan penyelundupan barang. Dalam perkembangan lingkungan strategis regional masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan,

baik



baik di darat maupun laut, pencemaran lingkungan, pemberlakuan MEA, pengiriman TKI maupun penerimaan TKA, dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme.

Hakekat ancaman dan tantangan tahun 2025 diperkirakan akan semakin kompleks, khususnya dalam diskriminasi antar agama khususnya Muslim yang ada di beberapa negara – negara baik Amerika, Eropa maupun Asia yang dapat berpengaruh pada situasi keamanan, hal tersebut juga memicu reaksi masyarakat muslim yang tergabung pada ormas Islam Indonesia yang kerap melaksanakan aksi unjuk rasa / aksi bela muslim di gedung kedubes yang berada di Kab/Kota di Indonesia. Masih adanya berbagai permasalahan sosial budaya di masyarakat diantaranya terkait dengan hak memperoleh pendidikan yang layak dan dengan adanya system zonasi yang diterapkan menuntut pemerataan fasilitas dan infrastruktur belajar mengajar di sekolah.

Heterogenitas baik suku, ras, agama dan antar golongan yang ada apabila tidak disikapi dengan rasa toleransi yang tinggi dapat memicu terjadinya konflik dan permasalahan Intoleransi di masyarakat, selain itu masuknya kebudayaan asing di masyarakat yang tidak diimbangi dengan filter yang kuat dapat berpengaruh terhadap nilai – nilai kebudayaan daerah dan nasional serta kearifan budaya lokal.

Menghadapi situasi seperti yang dideskripsikan tersebut di atas, Polda Jatim sebagai kepanjangan tangan Polri merupakan penanggung jawab keamanan dalam negeri dituntut untuk mampu melaksanakan tugas pokok, wewenang serta peran yang diberikan oleh negara secara profesional, proporsional, transparan, akuntabel, cepat dan tepat agar setiap potensi ancaman, hambatan dan gangguan yang berimplikasi terhadap situasi kamtibmas di Jawa Timur dapat segera diselesaikan dengan tuntas sesuai harapan masyarakat.

Maka perkembangan lingkungan strategi nasional harus dilihat dari faktor- faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa bergerak dinamis dan senantiasa berubah di setiap daerah. Semua isu strategis baik global, regional dan nasional tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renja Polda Jatim TA 2025.

Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polres Sampang yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

II. Polres Sampang

1. Situasi Kamtibmas di Wilayah Kab. Sampang sangat dipengaruhi oleh aspek Ipoleksosbudkam, Konfigurasi kerawanan diwarnai oleh bentuk – bentuk ancaman yang dapat mengganggu eksistensi kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang dapat dikategorikan ancaman terhadap ideologi Pancasila, Integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia, kelangsungan pemerintahan dan ancaman terhadap masyarakat baik dari WNI maupun WNA yang kemungkinan sedang berada di wilayah Kab. Sampang;

2. pada.....



2. Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 bertempat di Pendopo Bupati Sampang Jl. Wijaya Kusuma Kel. Gunung Sekar Kec./Kab. Sampang telah dilaksanakan kegiatan Pengukuhan Dan Penyerahan Surat Keputusan Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Di Kab. Sampang. (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa Terbaru) yang telah diresmikan pada 25 April 2024;
3. Berdasarkan Nomor: R/INSUS-744/XII/1.1.14/2024/Satintelkam Tanggal 29 Desember 2024 Perihal Perkembangan Pemilihan Kepala Desa (pilkades serentak) di wilayah Kabupaten Sampang Mengenai 180 Desa se Kab Sampang dalam satu hari sangat berpotensi akan dilaksanakan pada tahun 2027 dan pelantikannya sekitar bulan Januari tahun 2028 (sesuai berakhirnya masa jabatan Kades definitif);
4. Program pemerintah guna mengimbangi dampak kenaikan BBM berupa pemberian subsidi di bidang Pendidikan, Kesehatan dan program strategis lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun rentan terjadi penyimpangan atau penyelewengan dalam pelaksanaannya sehingga target yang dicapai tidak maksimal;
5. Kegiatan ekonomi dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam di Kab. Sampang dalam bentuk eksplorasi Migas dan proses seismik oleh perusahaan Migas PT. Medco, HCML dan Petronas, saat ini merupakan proses eksplorasi sehingga akan berpengaruh terhadap dinamika kegiatan ekonomi wilayah Kab. Sampang;
6. Pemanfaatan sumber kekayaan alam berupa kandungan minyak dan gas bumi wilayah perairan Jawa Timur di selat Madura yang masuk wilayah Provinsi dan wilayah Kab. Sampang yang dieksploitasi oleh investor baik dalam negeri maupun luar negeri sehingga berdampak meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar lokasi namun juga berpotensi menimbulkan kerawanan Kamtibmas khususnya nelayan wilayah Kec. Sampang, Camplong dan Sreseh;
7. Kegiatan ekonomi rakyat Kab. Sampang yang bermata pencaharian sebagai Petani, nelayan, pedagang dipengaruhi oleh perubahan iklim yang ekstrim sehingga kebutuhan bahan pokok masih menggantungkan pada suplay dari luar Kab. Sampang seperti sembako dan kebutuhan sekunder lainnya;
8. Pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi ditandai dengan kepadatan penduduk menyebabkan meningkatnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan sehingga menjadi suatu kerawanan tersendiri. Dengan demikian tingkat sosial masyarakat dapat berpengaruh terhadap situasi Kamtibmas di wilayah Kab. Sampang dengan keterbatasan sarana dan prasarana dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas oleh orang asing maupun domestic;
9. Permasalahan indikasi terjadinya tindak pidana korupsi oleh Pejabat Pemerintah maupun perorangan penanganannya akan menjadi prioritas sedangkan kejahatan konvensional diperkirakan akan meningkat baik secara kuantitas / kualitas seiring



kemajuan teknologi di era globalisasi serta beberapa kasus lain diantaranya :
Curas, Curat, Curanmor, Curhewan, aniaya, Narkoba dll;

10. Pelanggaran lalu – lintas yang dilakukan oleh pengendara akan tetap tinggi hal ini didasarkan pada peningkatan jumlah kendaraan R2/R4 yang tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas jalan serta sikap pengguna jalan dalam mengendarai kendaraan yang tidak mematuhi hukum dan disiplin dalam berkendara;

11. Melaksanakan Program Presiden.

17 Program Prioritas Presiden, diantaranya :

- a. Mencapai Swasembada Pangan, Energi, Dan Air;
- b. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara;
- c. Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi;
- d. Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi;
- e. Pemberantasan Kemiskinan;
- f. Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba;
- g. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan Bagi Seluruh Rakyat;
Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan Dan Penyediaan Obat Untuk Rakyat;
- h. Penguatan Pendidikan, Sains Dan Teknologi, Serta Digitalisasi;
- i. Penguatan Pertahanan Dan Keamanan Negara Dan Pemeliharaan Hubungan Internasional Yang Kondusif;
- j. Penguatan Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, Serta Penyandang Disabilitas;
- k. Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup;
- l. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, Dan Pestisida Langsung Ke Petani;
- l. Menjamin Rumah Murah Dan Sanitasi Untuk Masyarakat Desa Dan Rakyat Yang Membutuhkan;
- m. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi, Penguatan UMKM Dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
- n. Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Berbasis Sumber daya Alam (SDA) Dan Maritim Untuk Membuka Lapangan kerja Yang Seluas-Luasnya Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi;
- o. Memastikan Kerukunan Antar Umat Beragama, Kebebasan Beribadah, Dan Perawatan Rumah Ibadah;
- p. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, Dan Peningkatan Prestasi Olahraga.

12. Program Asta Cita diantaranya

- a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru;
- c. Meningkatkan.....



- c. Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, Dan Melanjutkan Perkembangan Infrastruktur;
- d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan Penyandang Disabilitas;
- e. Melanjutkan Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri;
- f. Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan kemiskinan;
- g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Dan Judi Online;
- h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang harmonis Dengan Lingkungan Alam Dan Budaya, Peningkatan Toleransi Umat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.

13. Program Beyond Trust Presisi (3 Bijak 7 Program 23 Giat 63 Indikator)

- a. Menerapkan Sistem Pemolisian Berbasis Digital
 - 1) Meningkatkan Kualitas Respon Keluhan Atau Aduan Melalui Media Sosial Secara Cepat Sebelum Viral
 - 2) Mengoptimalkan Manajemen Citra
- b. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Unggul
 - 1) Meningkatkan Manfaat Bakti Kesehatan Sebagai Bentuk Kepedulian Polri Terhadap Masyarakat
 - 2) Meningkatkan Manfaat Bakti Sosial Sebagai Bentuk Kepedulian Polri
 - 3) Meningkatkan Manfaat JUMAT CURHAT Dan MINGGU KASIH Sebagai Sarana Bagi Kasatwil Untuk Menerima kritik, Masukan Maupun Aduan Publik Serta Membangun Citra Polri Yang Humanis
 - 4) Mengoptimalkan Satgas Pangan Polri Untuk Mendukung Kegiatan Swasembada Pangan
 - 5) Mengoptimalkan Dukungan Terhadap Kegiatan KRYD Nusantara Cooling System 2023-2024
 - 6) Mendukung Kerukunan Antar Umat Beragama Dan Kebebasan Beribadah
- c. Memantapkan Pemeliharaan Kamtibmas
 - 1) Mengoptimalkan Pengamanan Pilkada Serentak Tahun 2024
 - 2) Mendukung Operasi Lilin Dalam Rangka Menyambut Natal Dan Tahun Baru
 - 3) Mengoptimalkan Pencegahan Korupsi, Judi (Online Dan Konvensional), Penyalahgunaan Narkoba, Penyelundupan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Serta Impor Ilegal
 - 4) Mengoptimalkan Peran Bhabinkamtibmas Sebagai Super Police
- d. Mengoptimalkan Penegakkan Hukum Yang Tegak Dan Humanis
 - 1) Memperkuat Kegiatan Pemberantasan Korupsi
 - 2) Memperkuat.....



- 2) Memperkuat Kegiatan Pemberantasan Narkoba
 - 3) Memperkuat Kegiatan Pemberantasan Judi Konvensional
 - 4) Memperkuat Kegiatan Pemberantasan Judi Online
 - 5) Memperkuat Kegiatan Pemberantasan Penyelundupan Barang Impor Illegal Dari Luar Negeri
 - 6) Memperkuat Kegiatan Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Pada Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (SDA/LH)
 - 7) Memperkuat Kegiatan Pemberantasan Kejahatan Terhadap Anak Dan Perempuan Serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
- d. Program Tematik
- 1) Peran Polri Dalam Mendukung Swasembada Pangan
- e. Mengoptimalkan Pengawasan
- 1) Mewujudkan Polisi Berintegritas Dengan Tidak Berperilaku Koruptif, Arogan Dan Bergaya Hidup Mewah
 - 2) Penanggung Jawab Kegiatan Beyond Trust Presisi TW IV Tingkat Mabes, Melaksanakan Arah, Anev Kegiatan Dan Verifikasi Kepada Pelaksana Di Tingkat Mabes, Polda Dan Polres

14. Kegiatan Prioritas Polri diantaranya:

penanggungjawab tingkat Mabes Polri:

- a. Kegiatan | Penanganan Laporan Masyarakat Terhadap anggota Polri;
- b. Kegiatan II Penanganan Terorisme, Radikalisme, Intoleransi;
- c. Kegiatan III Penanganan TPPO dan PPA serta Kelompok Rentan;
- d. Kegiatan IV Perburuan dan Penangkapan Bandar Narkoba dan Jejaringnya;
- e. Kegiatan V Penanganan Tindak Pidana Siber;
- f. Kegiatan VI Pelatihan SDM Unggul dan Berintegritas;
- g. Kegiatan VII Pengamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar;
- h. Kegiatan VIII Penyelesaian Kasus Tindak Pidana di Wilayah Perairan Indonesia;
- i. Kegiatan IX Pengamanan Objek Vital dan Target Rentan;
- j. Kegiatan X Perburuan dan Penangkapan Kelompok Teroris MujahidinIndonesia Timur dan Jejaring Terorisme.

1. Perkembangan aspek kehidupan masyarakat

a. Umum.

- 1) Kabupaten Sampang merupakan satu bagian dari wilayah Provinsi Jawa timur ke 27 yang terletak pada posisi 6°5'-7°13' lintang selatan dan 113°39' bujur timur.
Dilihat dari ketinggian wilayah Kabupaten Sampang berada pada 1.5 M – 118 M diatas permukaan air laut dan secara administrasi Kab. Sampang berbatasan dengan :

a) Sebelah.....



10 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES SAMPANG
NOMOR : KEP / 14 /I/ 2025
TANGGAL : 31 JANUARI 2025

- a) Sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa.
 - b) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan.
 - c) Sebelah barat berbatasan dengan Kab. Bangkalan.
 - d) Sebelah selatan berbatasan dengan selat Madura.
- 2) Secara Administratif Kab. Sampang dibagi menjadi 4 (Empat) wilayah pembantu Bupati 14 Kecamatan 180 desa dan 6 kelurahan dengan luas wilayah 1.233,30 KM². Kecamatan Banyuates merupakan kecamatan terluas yaitu 141,23 KM² atau 11.45% dari luas Kab. Sampang dan Kecamatan Pangarengan merupakan kecamatan terkecil yaitu dengan luas 42,69 KM² atau 3,46% dari luas wilayah Kab. Sampang;
- 3) Keadaan geografis Kab. Sampang yang cukup luas dan berbatasan langsung dengan laut Jawa di sebelah utara dan selat Madura disebelah selatan serta adanya banyak sungai yang membawa pengaruh baik secara positif maupun negatif terhadap situasi Kamtibmas di Wilkum Polres Sampang sehingga memerlukan antisipasi aksi kriminalitas yang menggunakan jalur perairan seperti pencurian kekayaan laut, perompakan, penyelundupan, laka laut, bentrok antar nelayan terkait wilayah penangkapan dan alat tangkap ikan.
- 4). Lokasi Kab. Sampang yang berada di tengah Pulau Madura dan berada disebelah selatan garis Khatulistiwa maka Kab. Sampang mempunyai 2 (Dua) jenis perubahan iklim yaitu musim penghujan dan musim kemarau antara lain:
- a) Musim penghujan diperkirakan mulai bulan Oktober 2025 sampai dengan bulan April 2026 dimana pada bulan Januari dan Pebruari biasanya curah hujan semakin tinggi dan berdampak pada banjir maupun tanah longsor.
 - b) Musim Kemarau diperkirakan pada bulan April sampai dengan bulan Oktober 2025 dimana biasanya pada bulan Agustus hingga Oktober beberapa daerah di Kab. Sampang mengalami kekeringan dan kesulitan mendapat air bersih.
 - c) Temperatur tinggi terjadi pada bulan Agustus/September yaitu mencapai 35,6°C dan terendah pada bulan juli yaitu 18,1°C dengan kelembaban sampai dengan 98 persen, mendung paling banyak terjadi dibulan Februari dan desember dengan rata–rata penyinaran matahari 52 dan 41,6%
 - d) Angin timur diperkirakan pada bulan Juni s/d Oktober sedang angin barat diperkirakan pada bulan Nopember s/d Mei.

5). Kab. Samp



- 5). Kab. Sampang memiliki daerah pesisir baik disebelah utara dan selatan yang berjarak \pm 5 KM dari tepi pantai dan pada umumnya pantai kondisinya landai atau dangkal namun pada saat air laut pasang dapat digunakan pendaratan perahu motor seperti di:
- a) Pelabuhan sungai Desa Nepa Kec. Banyuates.
 - b) Pelabuhan Tanglok di Kel. Banyuanyar Kec. Sampang.
 - c) Pelabuhan Sungai Camplong di Ds. Dharma Camplong Kec. Camplong.
 - d) Pelabuhan Sungai Pangarengan di Desa / Kec. Pangarengan
 - e) Pelabuhan di Ds. Gulbung Kec. Pangarengan.
 - f) Pelabuhan sungai Sreseh di Ds. Sreseh Kec. Sreseh.
 - g) Pelabuhan di Ds. Marparan Kec. Sreseh.
 - h) Pelabuhan di Ds. Disanah Kec. Sreseh.
- 6). Data Jumlah Penduduk Kabupaten Sampang
- a) Jumlah penduduk Kab. Sampang 981.488 Jiwa jiwa, laki-laki 485.675 Jiwa, perempuan 495.813 jiwa. (sumber: Dispendukcapil Semester 1 Tahun 2025)
 - b) Jumlah penduduk berdasarkan kelamin
 - (1) Laki-laki 485.675 jiwa
 - (2) Perempuan 495.813 jiwa
 - c) Jumlah penduduk berdasarkan kewarganegaraan
 - (1) WNI 981.488 jiwa (sumber: Dispendukcapil Semester 1 Tahun 2025)
 - (2) WNA Nihil
 - d) Jumlah penduduk dan usia angkatan kerja potensial cukup tinggi namun tidak mendapatkan kesempatan kerja / usaha.
 - e) Mobilitas penduduk cukup tinggi.
 - f) Temperamen penduduk cukup tinggi.
 - g) Rasa solidaritasnya tinggi.

1. Perkembangan lingkungan strategis Kab. Sampang dalam tahun 2025 dipengaruhi dengan :

- a. Hasil rekapitulasi suara untuk Pilkada Sampang 2024, yakni paslon nomor urut 1 Muhammad Bin Muafi Zaini-Abdullah Hidayat memperoleh suara 294.605 suara, sedangkan paslon nomor urut 2 Slamet Junaidi dan Ra Mahfud memperoleh sebanyak 338.482 suara. Paslon nomor urut 2 unggul 43.877 suara dari paslon nomor urut 1. Adapun suara sah Pilkada Sampang 2024 sebanyak 633.087



suara, suara tidak sah sebanyak 12.635 suara, dan suara sah digabung dengan suara tidak sah sebanyak 645.722. Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2024 digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan laman resmi MK RI, gugatan tersebut diajukan oleh tim hukum pasangan calon nomor urut 1 Muhammad Bin Muafi Zaini-Abdullah Hidayat (Mandat) pada Selasa, 10 Desember 2024, pukul 22.09 WIB dan putusannya akan dibacakan pada tanggal 7 Maret – 11 Maret 2025;

- b. Berdasarkan Perbup Sampang Nomor 27 tahun 2021 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Bahwa Pelaksanaan Pilkades serentak Kab Sampang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati Sampang dan Bupati Sampang telah menetapkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/272/KEP/434.013/2021, tanggal 30 Juni 2021 tentang pelaksanaan Pilkades serentak Kab. Sampang tahun 2025 dengan konsekuensi dari SK Bupati Sampang tersebut yaitu Jabatan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2021 dan 2025 akan di jabat oleh PJ. Kades;
- c. Kebijakan Pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dengan membangun sarana dan prasarana pemerintah dengan partner rekanan yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding paket pekerjaan yang tersedia;
- d. Pelaksanaan Program Pemerintah terkait dana bantuan sosial PKH, BST, BLT DD, BSP/BPNT maupun dari anggaran dana desa serta Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dalam rangka memberikan bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
- e. Kegiatan eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Wilayah Kab. Sampang oleh PT. Medco, PT. HCML dan PT. Petronas di semenanjung Pantai wilayah selatan dan utara Kota Sampang memungkinkan masih akan terus berlangsung pada Tahun 2025;
- f. Pelestarian budaya masyarakat Madura khususnya Kab. Sampang dengan menyelenggarakan kegiatan yang mengikutsertakan peran masyarakat Misalnya : kerapan sapi, pameran batik madura dan pentas kesenian, hiburan tradisional dll;
- g. Keamanan di Kab. Sampang dipengaruhi dengan terjadinya beberapa gangguan Kamtibmas yang terjadi baik secara konvensional maupun transnasional.

1) Aspek.....





1) Aspek Ideologi

- a) Munculnya upaya menghidupkan kembali ideologi Komunis di Indonesia ataupun ideologi lain diluar Pancasila, namun untuk saat ini wilayah Kab. Sampang belum ditemukan adanya isu-isu komunisme tersebut;
- b) Eksistensi Kelompok agama (Kelompok Islam Radikal) yakni Kelompok Eks HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan kelompok eks FPI (Front Pembela Islam) yang menghendaki pedoman hidup bangsa Indonesia harus berpegang pada prinsip – prinsip kebenaran agamanya, diindikasikan masih aktif dalam pengorganisasiannya namun gerakannya lebih *soft*, rapi diibaratkan menggunakan gerakan bawah tanah;
- c) Pembentukan Jaringan Terorisme baru dengan merekrut warga Sampang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang dangkal atau setengah-setengah, *broken home* dsb berpeluang tinggi dijadikan jaringan baru;
- d) Munculnya paham-paham baru / madzab yang tidak jelas berkedok agama dan mempengaruhi masyarakat yang notabene kurang paham terhadap agama yang dianut sehingga mudah terpengaruh adanya ajaran/aliran baru yang semakin menyesatkan terlebih melanggar hukum.

2) Aspek Politik

- a) Pelantikan Rudi Arifiyanto sebagai Pj Bupati Sampang berdasarkan SK Mendagri Nomor 100.2.1.3/0501/OTDA tertanggal 7 Januari 2024, Rudi Arifiyanto ditunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Penjabat (Pj) Bupati Sampang menggantikan Slamet Junaidi yang purna tugas per tanggal 30 Januari 2024;

b) Hasil



14 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES SAMPANG
NOMOR : KEP / 14 /I/ 2025
TANGGAL : 31 JANUARI 2025

- b) Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang tahun 2024 digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan laman resmi MK RI, gugatan tersebut diajukan oleh tim hukum pasangan calon nomor urut 1 Muhammad Bin Muafi Zaini-Abdullah Hidayat (Mandat) pada Selasa, 10 Desember 2024, pukul 22.09 WIB. Gugatan ini tercatat dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 239/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Gugatan tersebut diajukan atas dugaan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dinilai mencederai prinsip kejujuran dan keadilan dalam Pilkada Sampang;
- c) Sebanyak 45 anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2024 resmi dilantik dan diambil sumpah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang, Jawa Timur, masa jabatan 2024-2029, Senin 26 Agustus 2024. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan 45 Anggota DPRD Sampang yang bertempat di Graha Paripurna DPRD itu dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang, Ratna Mutia Rinanti, SH., M.Hum. Prosesi pelantikan juga ditunjuk Ketua Sementara DPRD Sampang Rudi Kurniawan dari Partai Nasdem, dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Sampang Vanny Dariyani dari PPP;
- d) Jabatan Kepala Desa diwilayah Kab Sampang yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2025 adalah sebanyak 31 Desa, namun terdapat 2 Kades yang meninggal dunia sebelum masa jabatan berakhir dan sudah terlebih dahulu dijabat oleh PJ Kades pada tahun 2022 yaitu Desa Tanggumong Kec Sampang PJ. Kades An. Lutfi dan Desa Panyirangan Kec Pengarengan PJ. Kades An. Abd. Fatah, S.Ap. dan Total jumlah Desa diwilayah Kab Sampang adalah sebanyak 180 Desa, dan yang dijabat oleh PJ. Kepala Desa sampai dengan saat ini adalah sebanyak 142 Desa dengan rincian:
- a) Tahun 2021 sebanyak 111 Desa
- b) Tahun 2025 sebanyak 31 Desa
- Sedangkan 38 Desa hasil Pilkades tahun 2019 saat ini masih dijabat oleh kepala Desa definitif yang mana jabatannya akan berakhir pada bulan Januari 2026;
- e) Kabupaten Sampang terdiri dari 14 kecamatan dan 186 Desa/Kelurahan (180 Desa dan 6 Kelurahan). Pemilihan Kepala Desa di Kab. Sampang mulai dilaksanakan secara serentak pada tahun 2025, pelaksanaan Pilkades serentak dibagi 3 (tiga) Gelombang yaitu :
1. Gelombang I sebanyak 108 Desa telah dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2025 (Desa Tebanah Kec Banyuates Cakades terpilih meninggal.....



- meninggal dunia sebelum dilantik sehingga dilaksanakan Pilkades kembali pada tahun 2017)
2. Gelombang II sebanyak 31 Desa telah dilaksanakan tanggal 16 Mei 2017
 3. Gelombang III sebanyak 38 Desa telah dilaksanakan tanggal 21 Nopember 2019
- f) Dari 180 Desa se Kab Sampang terdapat 4 (empat) Desa yang belum melaksanakan Pilkades serentak pada gelombang I, II dan III dikarenakan melaksanakan Pilkades pada tahun 2014 dengan masa akhir jabatan kepala Desa sampai dengan bulan Mei 2020 dan direncanakan akan melaksanakan Pilkades pada Pilkades serentak tahun 2025, adapun keempat Desa tersebut yaitu :
1. Desa Kramat Kec. Kedungdung, MAJ tanggal 22 Mei 2020
 2. Desa Banjar Kec. Kedungdung, MAJ tanggal 22 Mei 2020
 3. Desa Batuporo Timur Kec Kedungdung, MAJ tanggal 22 Mei 2020
 4. Desa Sawah Tengah Kec Robatal, MAJ tanggal 12 Mei 2020
- g) Pelaksanaan Pilkades serentak 180 Desa di Kab. Sampang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Sampang nomor: 188.45/272/KEP/434.013/2021, tanggal 30 Juni 2021. Sehubungan dengan keputusan Bupati Sampang tentang pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2025 menimbulkan reaksi penolakan dari pok masyarakat al :
- (1) Tanggal 26 Juli 2021 KMM (Kalangan Muda Madura) dengan Korlap aksi an. KURDI akan melakukan Unras, namun dibatalkan, selanjutnya Tanggal 28 Juli 2021 silaturahmi KMM (Kalangan Muda Madura) dengan Bupati Sampang dan Kapolres Sampang di Pendopo Trunojoyo Sampang;
 - (2) Tanggal 30 Juli 2021 di depan Kantor Pemkab Sampang dilaksanakan Aksi Unras dalam rangka memperingati 2,5 tahun (30 Januari 2019 - 30 Juli 2021) kepemimpinan Bupati Sampang (H. Slamet Junaidi) oleh FORMASA (Forum Mahasiswa Sampang), jumlah massa 3 orang dengan korlap sdr. Arifin MA (Ketum FORMASA);
 - (3) Tanggal 04 Agustus 2021 di Kantor Dinas PMD Sampang dilaksanakan Audensi oleh Gabungan LSM (Jaka Jatim, MDW dan Gamasa) terkait Perbup 27 tahun 2021 tentang (kewenangan PJ Kepala Desa dan masa jabatan perangkat Desa), Audiens 17 Orang dengan Korlap an. BUSIRI (Ketua LSM Jaka Jatim);

(4) Tanggal.....



16 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES SAMPANG
NOMOR : KEP / 14 /I/ 2025
TANGGAL : 31 JANUARI 2025

- (4) Tanggal 22 Agustus 2021 di Ruang Besar Komisi DPRD Sampang dilaksanakan Audensi oleh Gabungan LSM Jaka Jatim, MDW dan Gamasa terkait Keberadaan, Kewenangan dan anggaran tim evaluasi Pejabat PJ Desa, Regulasi pemilihan BPD dan Permendagri RI Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kades, Audiens 35 orang, Korlap an. BUSIRI;
- (5) Tanggal 01 Oktober 2021 di depan Kantor DPRD Sampang dilaksanakan Unras penolakan keputusan Bupati Sampang;
- (6) tentang pelaksanaan Pilkades serentak Kab. Sampang tahun 2025 oleh Aliansi Mahasiswa Sampang Tolak Pilkades;
- (7) (AMSTP) 2025, jumlah massa 25 orang dengan Korlap aksi an. SOFYAN;
- (8) Tanggal 06 Oktober 2021 di depan Pemkab Sampang dilaksanakan Unras Menuntut SK Bupati Sampang Nomor : 188.45/272/KEP/434.013 /2021 tentang pelaksanaan Pilkades serentak di Kab. Sampang oleh AMS (Aliansi Masyarakat Sampang), Massa 50 orang, Korlap ; M. RIFA'I, ROLIS SANJAYA,M. YANTO dan H. MINO;
- (9) Tanggal 6 Oktober 2021 DEMS (Dewan Masyarakat Sampang) dengan Ketua an. AZIS HARUNA melalui Advocad / Konsultan MU & Partners mengirimkan surat kepada Bupati Sampang perihal keberatan terhadap Keputusan Bupati Sampang tentang pelaksanaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sampang pada tahun 2025;
- (10) Tanggal 7 Oktober 2021 di Pendopo Bupati Sampang telah dilaksanakan *Pertemuan Bupati Sampang dengan Perwakilan AMS / Aliansi Masyarakat Sampang* (ROLIS SANJAYA, H. MINO dan AZIS). Tuntutan ; Menolak Keputusan Bupati Sampang tentang penundaan Pilkades Sampang 2025, Meminta Bupati Sampang mencabut SK Penundaan Pilkades Sampang 2025 dan Meminta Bupati Sampang menandatangani draft MoU tersebut sehingga Pilkades Sampang bisa digelar di tahun 2021-2022;
- (11) Tanggal 16 Oktober 2021 telah beredar unggahan di Youtube Channel **Podcast Mahasiswa** yang berjudul **"KHAWATIR SAMPANG SEPERTI "ORDE BARU"!!! | PODCAST MAHASISWA | POLEMIK PENUNDAAN PILKADES | MADURA"**. dengan narasumber an. SOFYAN (Korlap aksi Aliansi Mahasiswa Sampang Tolak Pilkades / AMSTP di DPRD Sampang tanggal 6 Oktober 2021)
Link:https://www.youtube.com/watch?v=2_QLONwNhEI;

(12) Tanç



- (12) Tanggal 18 Oktober 2021, AMSTP 2025 mengirimkan surat nomor: 06/SU/AMTP/X/2021 perihal permohonan dialog terbuka kepada Bupati Sampang dan Ketua DPRD Sampang dengan Mahasiswa dan masyarakat terkait dengan keputusan Bupati Sampang tentang pelaksanaan Pilkades serentak di Kab. Sampang tahun 2025 (Dialog terbuka tidak terlaksana);
- (13) Tanggal 28 Oktober 2021 akan dilaksanakan Aksi Unras oleh RASBA (Rakyat Sampang Bersatu) ke Pemkab Sampang SK
- (14) Bupati Sampang ttg pelaksanaan Pilkades Serentak Kab Sampang tahun 2025, Massa ± 50 orang dengan Korlap an. H. MINO. (Aksi gagal dilaksanakan karena Korlap H. MINO Sakit);
- (15) Tanggal 04 November 2021 Ormas RAMBU (Rakyat Menggugat Bupati) akan melaksanakan Unras ke Kemendagri RI, Jumlah massa ± 35 orang dengan Korlap an. AZIS MUSLIM HARUNA, Aksi Unras tidak jadi dilaksanakan dan diganti dengan giat Audensi yang akan dilaksanakan tanggal 09 November 2021 di Kantor Dirjen Bina Pemdes RI, namun giat Audensi juga tidak jadi dilaksanakan.
- h) Pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 bertempat di gedung PKPRI Jl. Rajawali Kec Sampang Kab Sampang Dinas PMD Kab Sampang menyelenggarakan giat sosialisasi terkait rencana pelaksanaan pilkades serentak Kab Sampang tahun 2025 Sasaran utama peserta sosialisasi yaitu kelompok kontra SK Bupati Sampang dan aktif melakukan aksi serta perwakilan BPD dengan perkiraan undangan sekitar 150 orang.
- (1) Nara sumber :
- Akademisi dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Kab Bangkalan
 - Akademisi dari Universitas Madura (UNIRA) Kab. Pamekasan
 - Akademisi dari dari Politeknik Madura (POLTERA) Kab Sampang.
- (2) Dalam giat sosialisasi tersebut dijelaskan apa saja yang menjadi dasar dan pertimbangan terbitnya SK Bupati Sampang nomor : 188.45 / 272 / KEP / 434.013 / 2021 tentang pelaksanaan Pilkades serentak Kab Sampang tahun 2025, serta akan ada sesi tanya jawab atau diskusi sehingga peserta sosialisasi dapat menanyakan dan akan langsung diberi penjelasan oleh nara sumber.
- i) Pada.....



- i) Pada tanggal 12 November 2021, Ormas RAMBU (Rakyat Menggugat Bupati) dengan Korlap an. AZIS MUSLIM HARUNA dan MOH. AGUS EFENDI melalui kuasa hukum MU & PARTNERS melakukan gugatan hukum ke PTUN Surabaya dengan materi gugatan SK Bupati Sampang nomor: 188.45/272/KEP/434.013/2021 tentang pelaksanaan Pilkada Serentak Kab Sampang tahun 2025. Pda tanggal 1 Desember 2021 PTUN Surabaya menolak gugatan hukum tsb.

3) Aspek Ekonomi

- a) Kenaikan harga BBM dan keterlambatan pasokan BBM yang timbul secara *tentative* atas kebijakan Pemerintah Pusat berpeluang menimbulkan potensi kerawanan Kamtibmas;
- b) Pengendalian Pemerintah terhadap stabilitas harga Sembilan bahan pokok yang menjadi kebutuhan penting masyarakat dinilai lemah berpotensi kerawanan Kamtibmas tinggi karena berkaitan dengan kebutuhan perut;
- c) Kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani dalam proses pendistribusiannya tidak efektif dan efisien mengalami keterlambatan serta terjadinya ketidakcocokan pupuk subsidi Pemerintah dengan kebutuhan petani Sampang sehingga berpotensi rawan dugaan penyelewengan;
- d) Permasalahan CSR yang terjadi ditengah masyarakat terdampak eksplorasi dan eksploitasi pengeboran Migas yakni Petronas Carigali di wilayah perairan Kec. Ketapang, PT. HCML Cnooc pty Ltd. di perairan Pulau Mandangin dan PT. Medco di wilayah perairan Kec. Camplong Kab. Sampang;
- e) Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sampang pada tahun 2022 sebesar 2,31% dan 5,27% Diluar Migas, Indeks perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan. Kenaikan yang paling tinggi pertumbuhannya adalah dari tahun 2021 ke tahun 2022;
- f) Indonesia bercita-cita menjadi negara dengan pendapatan per kapita yang setara dengan negara maju, sehingga dapat keluar dari Middle Income Trap (MIT). Oleh karena itu, Indonesia perlu mengubah pendekatan dalam membangun masa depan, dari reformatif menjadi transformatif, melalui 3 area perubahan, yakni transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola, tentunya ini merupakan aplikasi di Daerah-daerah khususnya wilayah Sampang dalam mewujudkan Cita-cita bangsa menuju Indonesia emas;

g) Munculnya



- g) Munculnya Potensi kerawanan terkait Pemerintah untuk merelokasi Pasar Srimangunan ke Pasar Margalela masih menjadi tranding permasalahan seputar penempatan pedagang ke tempat yang baru.

4) Aspek Sosial Budaya

- a) Dalam bidang pendidikan Formal baik ditingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan menengah, sekolah lanjutan tingkat atas dan perguruan tinggi dari tahun ketahun mengalami peningkatan jumlah pelulusan yang tidak disertai dengan fasilitas dan kondisi Sekolah yang kurang memadai dalam hal ini perawatan gedung/Sekolah;
- b) Pada saat memasuki bulan agama islam di Kabupaten Sampang sering diadakan kegiatan islami yaitu maulid, imtihan, pernikahan dan Haji;
- c) Adanya acara petik laut pada daerah pantai yaitu kecamatan Camplong, Sreseh, Pangarengan, Sokobanah, Ketapang dan Banyuates perlu adanya pengamanan Polri sehingga acara berjalan dengan lancar;
- d) Pendidikan secara nasional merupakan masalah yang sangat menonjol serta berdampak pada situasi Kamtibmas diantaranya :
- (1) Ujian Nasional (Unas) tingkat SMU / SMK sederajat, tingkat SLTP sederajat, tingkat Sekolah Dasar mengalami kendala akibat tekhnis/jaringan.
 - (2) Proses seleksi Penerimaan mahasiswa, murid baru tingkat SMU, SLTP dan SD yang dilakukan tidak transparan dan adanya indikasi KKN agar dapat masuk ke sekolah favorit yang diinginkan dengan mengenyampingkan program yang sudah ditetapkan Pemerintah.
 - (3) Adanya indikasi penyalahgunaan dana BOS/dana bantuan lainnya oleh oknum Kepala Sekolah maupun oknum Dinas Pendidikan untuk kepentingan pribadi.
 - (4) Kesalahan dalam penerbitan buku Sekolah tidak sesuai dengan program Pendidikan nasional yang ditetapkan
- e) Mayoritas penduduk Kab. Sampang menganut ajaran Islam yang cukup fanatik sehingga memilih lingkungan pendidikan di Pondok pesantren yang sudah dilengkapi sarana pendidikan setara umum

SD/MI.....



SD/MI/SMP/MTs dari pada pendidikan formal yang disediakan oleh Pemerintah;

- f) Moratorium proses seleksi / rekrutmen Calon pegawai Negeri sipil tingkat Pusat, Daerah (Provinsi/Kabupaten) untuk semua jurusan dirasa belum memenuhi kebutuhan pekerjaan dengan jumlah pelamar;
- g) Kegiatan sosial Masyarakat Kab. Sampang yang dilakukan di beberapa acara peringatan hari besar Islam/nasional masih didominasi oleh nuansa budaya masyarakat Madura;
- h) Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari sebagian besar masyarakat Kab. Sampang khususnya masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah (SD/SMP) memilih untuk bekerja diluar negeri dengan harapan bisa merubah taraf hidup lebih baik yang umumnya menjadi Negara sasaran yaitu Malaysia, Taiwan dan Arab Saudi serta wilayah regional Jakarta dan Kalimantan;
- i) Adanya pendeportasian Tenaga kerja Indonesia asal Kab. Sampang yang di luar negeri (Malaysia dan arab saudi) karena tidak memiliki dokumen resmi maupun habis masa berlakunya serta usai menjalani tindak pidana di negara tersebut;
- j) Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor memasuki musim hujan di Kab. Sampang yang di akibatkan hujan kiriman dari wilayah utara yang merupakan daerah perbukitan menuju Kota Sampang yang merupakan daerah lembah;
- k) Budaya yang sering dilakukan pada Kabupaten Sampang yaitu Shalawat bersama (Haul), Acara petik laut, kerapian sapi, daul combo, pameran pembangunan, hiburan rakyat serta perayaan hari jadi Kabupaten Sampang.

5) Aspek Keamanan

- a) Terjadinya beberapa gangguan Kamtibmas yang terjadi baik secara konvensional maupun transnasional;
- b) Pembentukan Jaringan Terorisme baru dengan merekrut warga Sampang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang dangkal atau setengahsetengah, broken home dsb berpeluang tinggi dijadikan jaringan baru;
- c) Munculnya paham-paham baru / madzab yang tidak jelas berkedok agama dan mempengaruhi masyarakat yang notabene kurang paham terhadap agama yang dianut sehingga mudah terpengaruh

adanya



adanya ajaran/aliran baru yang semakin menyesatkan terlebih melanggar hukum;

- d) Meningkatnya angka kemiskinan dan jumlah pengangguran yang dihadapkan pada situasi serta terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia merupakan factor yang dapat mendorong seseorang untuk berspekulasi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya/keluarganya dengan cara instant melakukan perbuatan criminal/ melanggar hukum;
- e) Faktor lain yang mendorong terjadinya tindak pidana adalah rendahnya tuntutan Jaksa/ringannya vonis hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan yang tidak menimbulkan efek jera sehingga setelah mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) ada kecenderungan untuk mengulangi perbuatan yang sama dikarenakan pula lemahnya pengawasan dan pembinaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan;
- f) Kriminalitas di Kab. Sampang secara keseluruhan menunjukkan bahwa ancaman faktual dalam bentuk kriminalitas menunjukkan peningkatan/kenaikan dari tahun ketahun terutama segi kuantitasnya, kejadian kriminalitas pada tahun 2023 menurut jenis kejahatan bulan Januari s/d Desember di Polres Sampang sebagai berikut:

NO	JENIS KASUS	CRIME TOTAL							
		TH. 2022			TH. 2023			TREND %	
		L	S	%	L	S	%	L	S
1	CURAT	32	30	93,75%	27	29	107,40%	18,51	3,44
2	CURANMOR	43	30	69,76%	45	34	75,55%	4,65	13,33
3	PERJUDIAN	8	9	112,5%	4	10	250%	50	11,11
4	NARKOBA	166	166	100%	156	156	100%	94%	94%
5	CURAS	2	1	50%	4	5	120%	100	400
6	PEMBUNUHAN	6	5	83%	4	3	75%	100	40
7	PENIPUAN	21	19	90,47%	30	15	50%	142	21,05



NO	JENIS KASUS	CRIME TOTAL							
		TH. 2022			TH. 2023			TREND %	
		L	S	%	L	S	%	L	S
8	KDRT	4	4	100%	1	1	100%	75	75
9	PENGHINAAN	0	0	0%	0	0	0%	0	0
10	ANIAYA	0	0	0%	0	0	0%	0	0
11	PERB TDK SENANG	2	3	150%	2	1	50%	100	66,66
12	PENGGELAPAN	8	5	62,5%	7	1	14,28%	81	80
13	ANIRING/ ANIAYA	24	25	104%	21	26	123,80%	12,5	4
14	PERKOSAAN	1	2	200%	1	2	200%	100	100
15	PENGEROYOKAN / 170	8	7	87,5%	17	13	76,47%	112,5	85,71
16	SENPI ILLEGAL	0	0	0%	1	0	0%	0	0
17	CEMAR NAMA BAIK	1	1	100%	1	1	100%	100	100
18	PEMBAKARAN	0	0	0%	4	1	25%	0	0
19	PERAMPASAN / PEMERASAN	0	0	0%	1	1	100%	0	0
20	SAJAM	10	15	150%	14	11	78,57%	40	26,66
21	CURWATPHON	0	0	0%	0	0	0%	0	0
22	PENCABULAN	1	1	100%	4	6	150%	300	500
23	TADAH	0	0	0%	0	0	0%	0	0
24	PERADILAN ANAK	0	0	0%	0	0	0%	0	0

25 SEROBOT.....



NO	JENIS KASUS	CRIME TOTAL							
		TH. 2022			TH. 2023			TREND %	
		L	S	%	L	S	%	L	S
25	SEROBOT TANAH	0	1	100%	2	1	50%	100	100
26	LARI ANAK/PERMPUAN	1	1	100%	1	1	100%	100	100
27	PEMALSUAN	1	1	100%	2	0	0%	5-	100
28	KET PALSU	0	0	0%	0	0	0%	0	0
29	PERCOBAAN CURAT/167	2	4	200%	1	0	0%	50	100
30	PERLINDUNGAN ANAK	19	19	100%	16	20	125%	84,2	5
31	PERZINAHAN	0	0	0%	1	0	0%	0	0
32	ANIRAT	2	2	100%	2	2	100%	100	100
33	KEBAKARAN	0	0	0%	1	1	100%	0	0
34	UANG/STNK PALSU	0	0	0%	0	0	0%	0	0
35	PENCULIKAN	0	0	0%	0	0	0%	0	0
36	PENGERUSAKAN/406	3	2	66%	3	2	66,66%	0	100
37	CUR HEWAN	0	0	0%	1	0	0%	0	0
38	RAMPAS MERDEKA ORG	0	0	0%	0	0	0%	0	0
39	PENCURIAN BIASA/KLRG	11	9	81%	7	10	142,85%	63,63	11,11
40	PERSETUBUHAN	0	0	0%	0	0	0%	0	0
41	PERCOBAAN CURAT/167	2	4	200%	1	0	0%	50	0

42 MIRAS/PSK.....



NO	JENIS KASUS	CRIME TOTAL							
		TH. 2022			TH. 2023			TREND %	
		L	S	%	L	S	%	L	S
42	MIRAS/PSK	0	0	0%	0	0	0%	0	0
43	PERCOBAAN BUNUH	0	1	100%	0	0	0%	0	0
44	LAWAN PETUGAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0
45	PENGANCAMAN	0	0	0%	0	0	0%	0	0
46	SEMBUNYI KAWIN	0	0	0%	0	0	0%	0	0
47	COBA KOSA	0	1	100%	0	0	0%	0	0
48	AKIBAT KELALAIAN	0	0	0%	0	0	0%	0	0
	JUMLAH	376	360	94,3 %	386	348	83,5%	9,52	1,03

1. Data Laka Lintas dan Pelanggaran Lintas.

Data kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Sampang pada tahun 2022 – 2023 sebagai berikut :

a) Data Laka Lintas dan Korban :

NO	URAIAN	JUMLAH		TREND	
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	ANGKA	%
1	Laka Lintas	277	415	138	50
2.	Meninggal Dunia	57	74	17	30
3.	Luka Berat	7	3	-4	-57
4.	Luka Ringan	344	490	146	42
5.	Kerugian Materiil	452.450.000	567.350.000	114.900.000	25

b) Data.....



b) **Data Langgar Lintas :**

NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH		KET
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	
	JUMLAH PELANGGARAN	3.407	1.799	
1	Muatan	187	253	
2	Surat-Surat (TNKB,STNK,SIM)	1.192	841	
3	Perlengkapan	388	105	
4	Marka / Rambu-Rambu	627	202	
5	Lain-Lain / Helm	1.013	398	
6	Denda Tilang			

(2) Trend Kejadian Kriminalitas yang menonjol yang terjadi setiap bulan pada tahun 2023 dari bulan Januari s/d Desember sebagai berikut :

a) Data Crime Total tahun 2022 – 2023 sebagai berikut :

NO	URAIAN	TAHUN		TREND		KET
		2022	2023	ANGKA	%	
1	CRIME TOTAL	210	230	+20	9,52 %	
2	CRIME CLEARANCE	198	192	-6	3,03 %	
3	CLEARANCE RATE	94,28%	83,47	10,81	11,46%	
4	CRIME CLOCK	24	38,08	14,08	-61,91%	
5	CRIME RATE	21,24	23,27	-2,03	-9,55%	
6	TUNGGAKAN PERKARA	22	38	16	-72,73%	
JUMLAH PENDUDUK		988.360 Jiwa				

b) Data Crime Index perkasus tahun 2022 – 2023 sebagai berikut :

NO	JENIS KEJAHATAN	CRIME TOTAL							
		TAHUN 2022			TAHUN 2023			TREND %	
		L	S	%	L	S	%	L	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CURAS	2	1	50 %	4	5	125 %		
2	CURAT	32	30	93,75 %	27	29	107 %		
3	CURANMOR	43	30	69,76 %	45	34	75%		
4	CURWAN	0	0	0%	1	0	0%		
5	CURBIASA	11	0	0%	7	10	142,85%		
JUMLAH		88	61	76,14%	84	78	92,85%		

7) Situasi



7) Situasi Perbatasan Kab. Sampang.

Perkembangan lingkungan strategis Kab. Sampang yang terbentuk akibat inter aksi wilayah Perbatasan dapat digambarkan sebagai berikut :

I). Dengan Wilayah Kab. Bangkalan.

- (a) Sisi sebelah utara Karakteristik masyarakat Kab. Sampang yang berbatasan dengan Kab. Bangkalan memiliki karakteristik yang hampir sama hanya sedikit perbedaan pada pola kehidupan yang lebih modern karena wilayah Kab. Bangkalan dekat dengan Kota Surabaya yang banyak diwarnai keberadaan masyarakat urban baik dari Indonesia timur maupun Indonesia barat;
- (b). Sisi sebelah selatan sebagai jalur alternatif menghubungkan kabupaten di sebelah timur Kab. Sampang serta sebagai jalur utama menuju ke pintu penyeberangan jembatan Suramadu sisi Madura;
- (c). Kab. Bangkalan sebagai akses jalan Suramadu memberikan ruang masuknya arus lintas ekonomi sekaligus kejahatan melalui jembatan tersebut sehingga memberikan imbas meningkatkan perekonomian maupun potensi kerawanan Kamtibmas di wilayah Kab. Sampang;
- (d). Sebagai daerah operasi pelaku tindak kejahatan dari wilayah Timur Kab. Sampang maupun Kota lain yang berpotensi juga terjadi di wilayah Kab. Sampang;
- (e). Kondisi jalan/sarana penghubung kedua wilayah memiliki potensi kerawanan yang hampir sama besarnya terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas maupun aksi kriminal lainnya;
- (f) Lokasi konflik/perebutan wilayah tangkapan antara nelayan terkait alat tangkap yang digunakan saat mencari ikan. Konflik antara nelayan Kec. Sreseh dengan nelayan Ds. Kwanyar Kec. Bangkalan sudah sejak lama terjadi namun dapat dikendalikan dan selalu berakhir damai.

II). Dengan Laut Jawa.

- (a). Berpotensi sebagai area mata pencaharian masyarakat Kab. Sampang sebagai nelayan atau kegiatan lain yang mungkin dikembangkan Misal: bertani rumput laut atau ternak ikan air laut;
- (b). Merupakan.....



- (b). Merupakan jalur transportasi masyarakat Kab. Sampang menuju ke wilayah lain dengan menggunakan perahu/Kapal sebagai alat transportasinya;
- (c). Lokasi sumber daya alam yang mulai di eksplorasi oleh pihak swasta mengetahui Pemerintah daerah;
- (d). Sebagai lalu lintas transportasi laut bagi masyarakat pesisir baik di Kab. Sampang dan Kab. Lainnya di Madura serta lalu lintas perdagangan antar pulau;
- (e). Medan operasi pelaku kejahatan dalam bentuk illegal fishing, jual beli BBM maupun barang hasil kejahatan lainnya.

III). Dengan Selat Madura / Sebelah selatan.

- (a). Wilayah Selatan Kab. Sampang merupakan perairan yang memiliki potensi sumber kekayaan alam yang saat ini sudah dilakukan eksplorasi oleh Pty. Husky Ltd dan PT. Medco Ltd. sehingga mendongrak sumber pendapatan Pemerintah daerah maupun pusat;
- (b). Sebagai wilayah mengais rejeki bagi masyarakat pesisir sebelah selatan yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan sarana perdagangan antar pulau/kabupaten lainnya;
- (c). Medan operasi pelaku kejahatan dalam bentuk eksplorasi kekayaan alam secara besar-besaran tanpa memperhatikan dampak lingkungan;
- (d). Lokasi konflik/perebutan wilayah tangkapan antara nelayan terkait alat tangkap yang digunakan saat mencari ikan.

IV). Dengan Kab. Pamekasan.

- (a). Sisi sebelah utara Masyarakat kab. Sampang dan Kab. Pamekasan memiliki karakteristik yang hampir sama bahkan di wilayah utara lebih dominan mengadopsi di Kab. Pamekasan karena jarak tempuh ke Kota sampang \pm 35 Km dengan Kota Pamekasan;
- (b). Sisi sebelah selatan juga memiliki kebiasaan yang sama mayoritas masyarakat Kab. Sampang yang berbatasan

langsung.....



langsung dengan Kab. Pamekasan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan;

- (c). Dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Kab. Sampang lebih banyak memilih belanja di Kab. Pamekasan, ini disebabkan harga barang lebih murah dan lengkap dibanding Kab. Sampang;
- (d). Sebagai jalur alternatif penghubung dengan wilayah Kabupaten paling timur wilayah Madura (Kab. Sumenep) yang berpeluang sebagai jalur potensi Kamtibmas.

b. Analisis SWOT.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polres Sampang dalam rangka melaksanakan fungsi keamanan tersebut dapat dianalisa dari faktor-faktor lingkungan intern maupun ekstern melalui analisa SWOT, yaitu :

- 1) Kekuatan :
 - a) Jumlah penduduk Kab. Sampang sebanyak 988.360 orang sedangkan personel Polri Polres Sampang beserta jajarannya 579 orang dengan rasio 1 : 1.707 yang tergelar di Mapolres, 14 Polsek yang terdiri dari :
 - Pamen sebanyak 5 orang.
 - Pama sebanyak 45 orang.
 - Bintara sebanyak 529 orang.
 - b). Jumlah Personel PNS Polri Polres Sampang sebanyak 14 Orang terdiri dari :
 - Golongan III sebanyak 2 orang.
 - Golongan II sebanyak 12 orang.
 - Golongan I sebanyak 0 orang.
 - c). Perbandingan jumlah penduduk dengan Bhabinkamtibas per kecamatan

NO	KECAMATAN	PENDUDUK	BHABIN	PERBANDINGAN RASIO
1	Sreseh	36.382	3	1:12127
2	torjun	41.925	4	1:10481
3	pangarengan	26.601	6	1:4433
4	Sampang kota	130.867	10	1:13086
5	camplong	88.560	5	1:17712

6 omb~~



29 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES SAMPANG
NOMOR : KEP / 14 /I/ 2025
TANGGAL : 31 JANUARI 2025

NO	KECAMATAN	PENDUDUK	BHABIN	PERBANDINGAN RASIO
6	omben	87.715	8	1:10964
7	Kedungdung	93.836	5	1:18767
8	Jrengik	38.396	3	1:12798
9	tambelangan	54.048	4	1:13512
10	banyuates	83.416	5	1:16683
11	Robatal	56.985	4	1:14246
12	Karang penang	77.157	5	1:15431
13	Ketapang	92.312	7	1:13187
14	sokobanah	80.160	7	1:11451
	TOTAL	988.360	76	1:13004

- d) Performa instrumental berupa perubahan sistem kinerja berbasis anggaran, sehingga pelayanan Polisi pada masyarakat diharapkan semakin efektif.
- e) Komitmen meningkatkan kuantitas anggota Polri, pada rasio jumlah Polisi terhadap pertumbuhan penduduk, jumlah personil Polres Sampang beserta jajarannya 579 dengan rasio 1 : 1707.
- f) Jumlah peralatan materiil (R2/4/6/10) untuk melaksanakan tugas pokok telah dicukupi mulai sejak tingkat Polsek dan Polres secara berjenjang sampai dengan fungsi pembinaan maupun operasional ditingkat Mapolres Sampang, antara lain yaitu :
 - a. Polres telah dilengkapi dengan mobil dinas jabatan dan Polsek telah dilengkapi rata-rata 7 unit R2 dan 2 unit R4 Data Ranmor Dinas Sesuai Simak BMN Sebagai Berikut:

Data Ranmor Dinas sesuai Simak BMN					
No	Kesatuan	Jenis kendaraan			
		R2	R4	R6	KAPAL
1	KAPOLRES		1		
2	WAKA POLRES		1		
3	BAG OPS	1	1		
4	BAG SDM	5	1		
5	BAG REN	2	1		
6	BAG LOG	1	2	1	
7	RESKRIM	2	1		
8	NARKOBA				

9 SAMAPTA



30 LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES SAMPANG
NOMOR : KEP / 14 /I/ 2025
TANGGAL : 31 JANUARI 2025

No	Kesatuan	Jenis kendaraan			
		R2	R4	R6	KAPAL
9	SAMAPTA	18	6	4	
10	LANTAS	16	6		
11	BINMAS	4	1		
12	TAHTI		1		
13	SIWAS				
14	SPKT		1		
15	INTEL	1	3		
16	SITIPOL				
17	SIUM				
18	SI KEU	1			
19	PROPAM		1		
20	SAT POL AIR	1	1		4
21	HUMAS		1		
22	SI DOKES	1	2		
23	SI HUKUM				
24	POLSEK KOTA	7	2		
25	POLSEK TORJUN	7	2		
26	POLSEK PENGARENGAN	7	2		
27	POLSEK CAMPLONG	6	2		
28	POLSEK JRENGIK	7	2		
29	POLSEK SRESEH	7	1		
30	POLSEK OMBEN	7	2		
31	POLSEK KARANG PENANG	8	1		
32	POLSEK KEDUNDUNG	8	2		
33	POLSEK ROBATAL	8	2		
34	POLSEK TAMBELANGAN	8	2		
35	POLSEK KETAPANG	5	3		
36	POLSEK BANYUATES	6	2		
37	POLSEK SOKOBANA	5	2		
JUMLAH TOTAL		149	58	5	4

2) Kelemahan.....



2) Kelemahan :

- a) Masih belum seimbang jumlah rasio petugas Polri dengan jumlah penduduk yang dilayani;
- b) Adanya oknum anggota Polri yang masih melakukan pelanggaran disiplin, kode etik profesi dan tindak pidana, sehingga dapat menghambat proses jalannya Reformasi Birokrasi Polri;
- c). Masih rendahnya SDM personel Polri di lapangan dalam menghadapi kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih, serta masih tingginya proses birokrasi yang tidak efisien dalam menyelesaikan perkara;
- d). Kesejahteraan anggota Polri yang rendah diantaranya masih belum terdukungnya gaji yang cukup yang berdampak menimbulkan eksekusi dalam pelaksanaan tugas;
- e). Masih belum terdukung sepenuhnya peralatan khusus (Alsus) untuk beberapa penugasan khusus oleh satuan-satuan operasional khususnya dalam pengungkapan kasus cyber crime;
- f). Penerapan teknologi informasi "On Line" dari Polsek langsung Mapolda dan sebaliknya kurang optimal, disebabkan keterbatasan peralatan, operator, dukungan anggaran operasional dan dukungan anggaran pemeliharaan;
- g). Sistem pembinaan karier, sistem penilaian kinerja, sistem kompensasi dan sistem Diklat yang belum secara total berbasis kompetensi;
- h). Kondisi bangunan Polsek Camplong Dan Polsek Robatal yang kurang layak sehingga pelayanan kurang prima sehingga butuh rehab mako Polsek.

3) Peluang :

- a) Sistem desentralisasi / otonomi daerah yang mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat saling menunjang dengan kontribusi Polri di daerah;
- b) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia diantara pergaulan antar bangsa, politik luar negeri bebas aktif, memotivasi komitmen Polres Sampang untuk berwawasan global.....



global, berorientasi nasional dan bertindak lokal dalam mengatasi gangguan keamanan;

- c) Partisipasi publik pada setiap upaya perpolisian masyarakat termasuk kesediaan membantu mengungkap perkara;
- d) Pembangunan jembatan Suramadu di samping memperlancar arus Lalu lintas akan mempercepat dan mempermudah dalam penanganan tindak pidana juga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi khususnya bagi kesejahteraan masyarakat Sampang;
- e). Hubungan kerjasama dan saling mendukung antar instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat berlangsung dengan baik;
- f). Tuntutan masyarakat secara umum akan terciptanya kondisi yang lebih kondusif dan stabil sehingga terbebas dari segala bentuk teror, ancaman dan gangguan;
- g). Reformasi Polri yang berkelanjutan, terus dilakukan secara bertahap diantaranya dilaunchingnya reformasi birokrasi sesuai dengan komitmen reformasi nasional yang terus bergulir,hal ini dapat membangun kemitraan (Patnership) masyarakat terhadap Polri;
- a) Adanya Ekplorasi society of petroleum engineers (SPE) memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sampang khususnya di daerah Kedungdung dan daerah Tambelangan memungkinkan menurunnya angka pengangguran.

4) Ancaman :

- a) Pemerintah mengumumkan pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tanggal 19 Juli 2017, Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang di Indonesia pada hari ini Rabu tanggal 30 Desember 2020. Kelompok ini menjadi perhatian serius Pemerintah karena kelompok tersebut menghendaki pedoman hidup bangsa Indonesia harus berpegang pada prinsip – prinsip kebenaran agamanya, dan posisi Ormas tersebut, berpotensi besar terhadap Sitkamtibmas khususnya di Kab. Sampang terlebih Kab. Sampang merupakan salah satu basis pengikut HRS yang cukup Fanatik;

b) pola.....



- b) Pola elit Politik dalam menjalin kerjasama / koalisi antar parpol di lembaga legislatif (DPRD Kab. Sampang) akan membawa perubahan / warna tersendiri terhadap perkembangan situasi politik di Kab. Sampang dalam menyikapi setiap kebijakan yang ditempuh oleh Bupati Sampang;
- c) Pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2025 akan diikuti seluruh Desa di wilayah Kab. Sampang sebanyak 180 Desa sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Sampang nomor: 188.45/272/KEP/434.013/2021, tanggal 30 Juni 2021;
- d) Proses rekrutmen penyelenggara/panitia Pilkada dan pengawasan berpotensi terjadinya unsur KKN, proses tersebut cenderung bernilai berat sebelah terhadap salah satu pendukung Calkades terlebih ketidak netralan oknum pejabat dan Pemerintah Daerah;
- e) Pasca dilaksanakan pemulangan pengungsi tahap I yang berjalan lancar memberikan dampak positif bagi warga pengungsi yang sudah kangen dengan keluarga, namun potensi keamanan terkait pengungsi sewaktu-waktu dapat berubah akibat kegiatan politik yang dibungkus agama (Politik Identitas);
- f) Permasalahan CSR yang terjadi ditengah masyarakat terdampak eksplorasi dan eksploitasi pengeboran Migas yakni Petronas Carigali di wilayah perairan Kec. Ketapang, PT. HCML Cnooc pty Ltd. di perairan Pulau Mandangin dan PT. Medco di wilayah perairan Kec. Camplong Kab. Sampang. Pemanfaatan sumber kekayaan alam yang ada di wilayah Kab. Sampang belum dapat dinikmati / menambah nilai pendapatan asli daerah Kab. Sampang karena banyaknya pihak/oknum yang terlibat didalamnya hanya untuk meraup keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu;
- g) Pelaksanaan Program Pembangunan dengan menggunakan APBD Kab. Sampang maupun Program pemerintah pusat berpotensi terjadinya penyalahgunaan/ penyelewengan oleh oknum birokrasi maupun pejabat lainnya;
- h) Aksi kriminalitas yang bersifat konvensional maupun modern akan diprediksikan meningkat seiring kemajuan teknologi dan alat komunikasi dengan menggunakan modus baru salah satunya melalui pemanfaatan media sosial dalam kejahatan online (Kasus Tipu Gelap);
- i) Adanya.....



- i) Adanya jaringan teroris yang beraktifitas di wilayah Kab. Sampang dan tidak terpantau oleh masyarakat dan petugas.

2. Identifikasi masalah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Polres Sampang, antara lain :

- a. Dampak perang Palestina dan Israel yang berlangsung secara masif dimana Indonesia mayoritas beragama muslim, demikian pula wilayah Kab. Sampang secara 96 % penganut Agama muslim sehingga sangat jelas akan condong pada Negara Palestina yang mayoritas Muslim. Hal tersebut berpotensi kerawanan Kamtibmas yang tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan isu SARA untuk membalaskan dendam umat Muslim yang ditindas Agama lainnya khususnya di Kab. Sampang;
- b. Dampak fenomena iklim el nino / perubahan cuaca ekstrem di Indonesia merupakan akibat dari interaksi kompleks antara laut dan atmosfer yang membawa konsekuensi luas bagi pola cuaca, ekosistem, dan perekonomian di Indonesia, Kab. Sampang khususnya;

Dampak - dampak El Nino meliputi:

- 1) Anomali Cuaca menyebabkan kekeringan, banjir, dan badai yang hebat. Daerah yang biasanya basah bisa mengalami kekeringan berkepanjangan, sementara daerah kering bisa terendam oleh hujan berlebihan;
- 2) Dampak pada Pertanian dan Panen berujung pada gagal panen dan kelangkaan pangan. Ini bisa mengancam ketahanan pangan baik di tingkat lokal maupun global;
- 3) Ekosistem Laut sangat rentan terhadap dampak El Nino. Pemanasan laut bisa menyebabkan pemutihan karang yang meluas sehingga perikanan juga terdampak dengan pergeseran distribusi dan kelimpahan ikan;
- 4) Dampak Sosial-Ekonomi diantaranya Kerusakan infrastruktur, penurunan produktivitas pertanian, dan lonjakan permintaan energi karena suhu ekstrem, semuanya memberikan tekanan pada ekonomi dan keuangan;
- 5) Dampak El Nino terhadap Kesehatan Manusia sering kali diasosiasikan dengan perubahan pola cuaca dan ekosistem, menyebabkan penyebaran penyakit.

d Selama.....



- d. Selama tahun 2023 terakhir kasus – kasus curanmor, curat, curas, pembunuhan, pencurian hewan, penganiayaan berat, penipuan, dan perjudian masih menunjukkan angka yang cukup tinggi dan tetap memberikan kontribusi terhadap tingginya crime total;
- e. Laka lantas dengan korban meninggal dunia selama tahun 2022 terakhir masih menunjukkan angka yang tinggi faktor penyebab yang paling dominan human error, ini dapat dilihat dari tingginya jumlah pelanggaran lalu – lintas yang umumnya mendahului kejadian laka lantas;
- f. Trend / perkembangan kasus – kasus menonjol dalam tahun 2023 yang perlu diperhatikan dan diperkirakan akan terjadi pada tahun 2025 adalah kasus – kasus yang bersifat massal dengan latar belakang;
- g. Masalah Pemerintahan (Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa) mulai dari pembentukan Panitia, Penentuan hari pelaksanaan, Penentuan lokasi Pemilihan, Jumlah warga yang memiliki hak pilih, Administrasi bakal calon dan penetapan hasil Pilkades;
- h. SARA yang bersumber dari agama / munculnya aliran sesat atau ajaran Sy'ah di Ds. Karang gayam kec. Omben kab. Sampang;
- j. Korupsi Kolusi dan nepotisme oleh Birokrasi Pemkab. Sampang dan Patronnya dalam menjalankan Kebijakan / Program;
- k. Isu terorisme yang masih belum di tangkap dan isu keberadaan jaringannya di wilayah Madura;
- l. Purna Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secara bersamaan antara satu desa dengan desa yang lain;
- m. Konflik internal Partai yang duduk di Legeslatif terkait pro kontra / dukung mendukung kebijakan Pemerintah daerah (Bupati);
- n. Masih tertundanya pemberian dana ganti rugi kepada pemilik tanah di pembangunan waduk Nepa di Ds. Montor Kec. Banyuates dan ganti rugi jaring nelayan dampak seismik PT Santos di perairan Selat Madura;
- o. Giat eksplorasi dan eksploitasi minyak dan Gas Bumi yang dilakukan di Lepas Pantai maupun di daratan Ds. Gunung eleh kec. Kedungdung kab. Sampang;
- p. Terjadinya Musibah banjir akibat curah hujan yang tinggi, tanah longsor akibat abrasi air laut maupun tebing yang kondisi tanahnya labil;
- q. Adanya kebijakan baru yang diterapkan oleh Bupati dan wakil Bupati terpilih dalam sistim Pemerintahan di Kab. Sampang;

r Proses.....



- r. Proses Rekrutmen / Penerimaan CPNS melalui jalur penggunaan Data Base maupun rekrutmen secara umum / internet;
- s. Pembagian / proses Tander Proyek Pembangunan fisik maupun non fisik yang dilakukan tidak sesuai prosedur;
- t. Dalam tahun 2025 berdasarkan analisa yang berkaitan dengan kalender kamtibmas dan kegiatan masyarakat diperkirakan terjadi peningkatan jumlah kasus / kwantitasnya terutama kasus kebakaran, perjudian, pembunuhan, penganiayaan biasa, pencurian biasa narkoba penggelapan dan korupsi.

BAB II.....



BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

1. Visi dan Misi Polda Jatim.

a) Visi Polda Jatim

“Terwujudnya keamanan dan Ketertiban di Seluruh Daerah Hukum Polda Jawa Timur”.

Makna Visi Polda Jatim :

Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah yang aman dan tertib atas peran dan fungsi Polda Jawa Timur.

b) Misi Polda Jatim

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di Lingkungan Polda Jawa Timur.”

Makna Misi Polda Jatim :

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

2. Visi dan Misi Polres Sampang.

a) Visi Polres Sampang

“Terwujudnya keamanan dan Ketertiban di Seluruh Daerah Hukum Polres Sampang.”

Makna Visi Polres Sampang :

Kabupaten Sampang menjadi wilayah yang aman dan tertib atas peran dan fungsi Polres Sampang.

b) Misi Polres Sampang

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat di Lingkungan Polres Sampang.”



Makna Misi Polres Sampang:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

3. Tujuan.

a. Tujuan Polda Jatim

- 1) menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Timur;
- 2) menetapkan regulasi dalam penegakan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur;
- 3) mewujudkan SDM Polda Jawa Timur yang profesional;
- 4) modernisasi pelayanan Polda Jawa Timur;
- 5) menerapkan manajemen Polda Jawa Timur yang terintegrasi dan terpercaya.

b. Tujuan Polres Sampang.

- 1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah hukum Polres Sampang, dengan indikator tujuan :
 - a). situasi dan kondisi yang kondusif bebas dari gangguan kamtibmas sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari;
 - b). berkurangnya tindak pidana kriminalitas dan mencegah gangguan kamtibmas dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif.
- 2) Menetapkan regulasi dalam penegakan hukum secara berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat Sampang, dengan indikator tujuan :
 - a). tercapainya penyelesaian dan pengungkapan penanganan kasus tindak pidana (Kejahatan Konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan Transnasional dan kejahatan berimplikasi Kontijensi);
 - b). peningkatan.....



- b). peningkatan pengungkapan dan penyelesaian tindak pidana yang transparan, akuntabel, objektif dan terpenuhinya hak tersangka dan korban dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.
- 3) Memuwujudkan SDM Polres Sampang yang Profesional
- a). Terciptanya Personil Polres Sampang Yang Berkompeten Dan Professional Dalam Bidang Fungsi Masing Masing;
 - b). Terbentuknya Dan Terwujudnya Sytem Penilaian Kinerja Yang Berbasis Elektronik.
- 4) Modernisasi pelayanan Polres Sampang, dengan indikator tujuan :
- terwujudnya peningkatan pelayanan prima Kepolisian yang transparan dan akuntabel.
- 5) Menerapkan manajemen Polres Sampang yang terintegrasi dan terpercaya, dengan indikator tujuan :
- terbentuknya Polisi yang melayani, melindungi dan mengayomi seiring dinamika masyarakat sehingga menjadi organisasi Polri yang berintegritas dan berkualitas yang memiliki standart pelayanan.

4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang diinginkan oleh Polres Sampang, yang memberikan *outcome* dari program yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polres Sampang. Untuk mencapai hal tersebut Polres Sampang menetapkan Sasaran Strategis yang diturunkan dari Sasaran Strategis Polda Jatim. Dalam merumuskan sasaran strategis di lingkungan Polres Sampang, ada beberapa kriteria yang ditetapkan, yaitu: mengukur pencapaian tujuan; mencerminkan berfungsinya outcomes dari program; selaras dengan sasaran Strategis yang ditetapkan Restra Polres Sampang, sesuai dengan tugas dan fungsi Polres Sampang, dan tetap sesuai dengan visi dan misi; memiliki sebab akibat (causality) secara logis dengan sasaran strategis polres Sampang; jelas dan terukur; dan dilengkapi dengan indikator dan target.

Berikut adalah penjabaran untuk sasaran Strategis Polda Jatim Dan Sasaran Strategis Polres Sampang :

a. Sasaran Strategis Polda Jatim

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu, “Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”, maka sasaran strategis Polda Jatim 2025 adalah sebagai berikut:



- 1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Penegakan Hukum Secara Berkeadilan;
- 3) Profesionalisme SDM Polda Jawa Timur;
- 4) Modernisasi Teknologi Polda Jawa Timur;
- 5) Sistem Pengawasan Polda Jawa Timur yang Akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani.

b. Sasaran Strategis Polres Sampang

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) yaitu, “Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”, maka sasaran strategis Polres Sampang 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan indikator kinerja utama Indeks pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Polres Sampang dengan variabel pembentuk :
 - a).Road Safety Indeks;
 - b).Indeks Comunity Policing;
 - c).Persentase kemampuan reduksi potensi gangguan;
 - d).Response time kehadiran Polres Sampang di TKP;
 - e).Tingkat keamanan di jalur perairan Indonesia;
 - f). Persentase penyelesaian perkara tindak pidana di jalur perairan;
 - g).Persentase pemenuhan pengamanan objek vital dan target rentan.
- 2) Penegakan Hukum Secara Berkeadilan, dengan indikator kinerja utama Indeks Gakkum Polres Sampang dengan variabel pembentuk :
 - a).Clearance rate kejahatan konvensional;
 - b).Clearance rate kejahatan kekayaan negara (Korupsi, Minerba);
 - c).Persentase penyelesaian perkara tindak pidana laka lantas;
 - d).Persentase penyelesaian perkara tindak pidana di jalur perairan.
- 3) Profesionalisme SDM Polres Sampang
 - a). Nilai Rata Rata SMK Anggota;



- b). Nilai Rata Rata PPK PNS Polres Sampang
 - c). Persentase Pemberian Reward Kepada Personel Berprestasi
- 4) Modernisasi Teknologi Polres Sampang, dengan indikator kinerja penunjang:
- a). Perentase counter opini negatif
- 5) Sistem pengawasan Polres Sampang yang akuntabel guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan melayani, dengan indikator kinerja penunjang :
- a). Indeks kepuasan layanan Kepolisian (IKLK) Polres Sampang dengan variabel pembentuk :
 - (1).Indeks kepuasan layanan Kepolisian (IKLK) Lantas;
 - (2).Indeks kepuasan layanan Kepolisian (IKLK) SPKT;
 - (3).Indeks kepuasan layanan Kepolisian (IKLK) Intel.
 - b). Nilai kinerja anggaran;
 - c). Persentase penanganan pengaduan masyarakat;
 - d). Persentase kemenangan dalam pemberian bantuan hukum.



BAB III

ARAH KEBIJAKAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Jatim Tahun 2025

a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “**Memelihara kamtibmas di wilayah Jatim secara proaktif guna menciptakan rasa aman masyarakat di wilayah Jatim**”, yaitu:

1) Meningkatkan penguatan peran Polda Jatim dalam menjaga Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) memetakan potensi g a n g g u a n , terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan situasi gangguan Kamtibmas lainnya; (giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/prog Harkamtibmas/SP1);
- b) melakukan Lidikpamgal dengan fokus pada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; (giat 3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog Harkamtibmas/SP 1);

2) Menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan serta aksi terorisme melalui kegiatan pencegahan yang produktif;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sampaing dalam memberikan konsultan dalam pemecahan masalah yang terjadi ditengah masyarakat; (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
- b) Pemberdayaan potensi masyarakat sebagai antisipasi terhadap gangguan Kamtibmas lainnya (Narkoba, Terorisme, Kejahatan Konvensional lainnya, dll). (giat 5076/prog Harkamtibmas /SP 1);
- c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerjasama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal dan deradikalisasi; (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
- d) patroli konten dan kontra narasi pada kanal-kanal media online dan media sosial yang sehat menjadi saluran penyebaran propaganda kekompok teroris;



- (giat 3143/prog Lidik sidik/SP 1);
- e) peningkatan jumlah konten edukasi pada media sosial;
(giat 3143/prog Lidik sidik/SP 1);
 - f) peningkatan jumlah kegiatan kampanye Siber MII kanal Siber TV;
(giat 3143/prog Lidik sidik/SP 1);
 - e) menetralsir dan menekan isu serta berita negatif yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas;
(giat 3149/prog Dukma/SP 1);
 - f) melaksanakan Patroli Perintis Presisi dan Patroli Kota Presisi sebagai eskalasi gangguan Kamtibmas yang terjadi berdasarkan perkiraan inteljen yang ada;
(giat 3143/prog lidik sidik/SP 1);
 - g) peningkatan kegiatan bintibmas masyarakat pesisir guna menekan gangguan terorisme dengan memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut;
(giat 3155/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - h) meningkatkan patroli di wilayah masyarakat pesisir dan sepanjang garis pantai dalam rangka melaksanakan pengamanan pencegahan terorisme dan penegakkan hukum di wilayah perairan Jawa Timur;
(giat 3155/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - i) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambaing kepada kelompok kontra radikal dan kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan;
(giat 3149/prog Dukma/SP 1);
 - j) melaksanakan Patroli secara berkala dan continue pada daerah rawan gangguan kamtibmas di wilayah hukum Polda Jatim;
(giat 3130/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - k) Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan risk assesmen pada obyek vital nasional dan obyek tertentu
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/);
 - l) Memetakan potensi aksi terorisme dan kontra radikalisme melalui lidikpamgal intel brimob serta konflik sosial dan gangguan keamanan lainnya dengan membuat zona back up wilayah sesuai dengan dislokasi Kompi jajaran Satbrimobda Jatim;
(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - m) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata serta memberikan layanan pengawalan VIP;



(giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1);

- n) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang aktif serta para penyelenggara fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri guna mewujudkan situasi keamanan yang kondusif;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1)
- 3) Mengoptimalkan kegiatan “Pemolisian Prediktif” dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif ditengah masyarakat (cooling system) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) Pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan program “Polisi RW” dan asistensi penguatan KBPPP (Keluarga Besar Putra Putri Polri);
(giat 3133/prog Harkamtibmas/SP 1);
- b) peningkatan giat Siskamling dan Satkamling guna meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberdayakan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan yang ada dilingkungan masing-masing;
(giat 3128/prog Harkamtibmas/SP 1);
- c) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan Kepolisian terbatas kepada BUJP, satpam dan Polsus;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 21, renaksi 79, 80);
- d) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan atau Patroli berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan gangguan Kamtibmas dan rawan bencana alam sesuai skala prioritas dalam bentuk Patroli Perintis Presisi dan Patroli Kota Presisi;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
- e) melakukan kegiatan patroli dialogis pada daerah rawan kejahatan (pemukiman, terminal, pasar, pelabuhan, dll);
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
- f) melaksanakan penegakan hukum terbatas terhadap terjadinya Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang terjadi di tengah masyarakat.
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
- g) pelaksanaan binluh Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas dengan sasaran masyarakat tidak terorganisir (Kawasan Pasar, Terminal, Tempat Wisata);
(giat 3133/prog Harkamtibmas/SP1);

h) pelaksana



- h) pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan peran aktif masyarakat seperti Lomba Polisi Sahabat Anak atau Polisi Cilik usia Sekolah Dasar tingkat polres jajaran dan pelaksanaan pemilihan duta lalu lintas yang melibatkan masyarakat umum sebagai peserta dengan sasaran pelajar SMA/SMK/Sederajat dan Mahasiswa/i. (giat 3133/prog Harkamtibmas/SP1);
- 4) melaksanakan penanganan konflik secara humanis;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) pemberian penyuluhan kontra radikal kepada Ormas/Komunitas dengan meteri nilai-nilai dasar Pancasila guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial; (giat 3112/prog Harkamtibmas/SP 1);
- b) mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis; (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
- c) penggalangan terhadap individu, kelompok, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, BEM, LSM dan beberapa serikat buruh maupun media sosial serta kerja sama dengan instansi terkait. (giat 3112/prog Harkamtibmas/SP 1)
- 5) memelihara Kamseltibcarlantas untuk meningkatkan rasa aman ditengah masyarakat saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan kegiatan Patroli, penjagaan di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas; (giat 3130, 3133/prog Harkamtibmas/SP 1);
- b) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan atau Patroli berdasarkan hasil pemetaan wilayah rawan gangguan Kamtibmas dan rawan bencana alam sesuai skala prioritas dalam bentuk Patroli Perintis Presisi dan Patroli Kota Presisi; (giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1);
- c) melanjutkan pelaksanaan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas dengan sasaran masyarakat terorganisir (Sopir Bus/AKDP/ Pariwisata/Gojek, Sopir Truk, Pelajar, Mahasiswa/i, TK/Paud); (giat 3130, 3133/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1);

d) melaksan



- d) melaksanakan kegiatan Turjawali di daerah yang rawan kriminalitas dan berperan aktif mengimbuu masyarakat dalam rangka mewujudkan Kamtibmas diwilayahnya masing-masing. (giat 3133/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - e) bekerjasama dengan stakeholder untuk melakukan review andal lalin pada objek vital sehingga dapat dilakukan langkahlangkah manajemen rekayasa lalu lintas sehingga dapat terwujud Kamseltibcarlantas; (giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1);
 - f) mengoptimalkan database tentang blackspot, troublespot, jalan rawan bencana, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kondisi jalan, dan seluruh permasalahan lalu lintas sebagai big data dalam memberikan Dikmas lantasi sehingga tepat guna dan tepat sasaran; (giat 3130, 3133/prog Harkamtibmas/SP 1/);
 - h) melaksanakan Patroli Perintis Presisi dan Patroli Kota Presisi sebagai eskalasi gangguan Kamtibmas yang terjadi berdasarkan perkiraan inteljen yang ada. (giat 3131/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1);
- 6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polda Jatim di wilayah rawan gempa dan bencana alam dan Slum area;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) pelaksanaan kontinjensi dengan pergelaran pasukan dalam rangka operasi kepolisian di wilayah rawan dan bencana; (giat 3130, 5081, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, 32 renaksi 74, 78, 129);
 - b) menyiapkan personel Polda Jatim yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan stakeholders dalam penanggulangan bencana alam; (giat 5087/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - c) menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan penanganan SAR terbatas oleh personil Sabhara, Brimob dan bantuan satwa dalam menghadapi ketanggapsegeraan penanggulangan bencana; (giat 3130, 5081, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19, 20, 32 renaksi 74, 78, 129);
 - d) memetakan masyarakat Desa/wilayah rawan gempa dan bencana oleh Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pasca bencana; (giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);



- e) bersama instansi terkait melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat yang berdampak bencana;
(giat 3072, 5076/prog Dukma/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 32, renaksi 31, 129);
 - f) mengoptimalkan pengamanan dan back up satuan kewilayahan dengan menggunakan bantuan satwa dalam rangka bantuan SAR terbatas penanganan bencana alam;
(giat 3072, 5076/prog Dukma/SP 1/SS 1);
 - g) meningkatkan Pelatihan melalui kerjasama dengan Badan Sar Nasional dan Penggiat Komunitas SAR Pengguna Satwa, seperti BNPB Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan SAR Daerah (Basarda);
(giat 5087/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1);
 - h) peningkatan kerjasama Intansi, Pembinaan Jaringan dan Kemitraan, Forum Komunikasi Polisi Dan Masyarakat (FKPM), Pokdar kamtibmas dan Fokus Group Discussion FGD Mitigasi bencana wilayah;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - i) membentuk Tim Trauma Healing bagi korban bencana alam;
(giat 3130, 5081/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - j) melaksanakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapan satwa dalambantuan SAR terbatas penanganan bencana alam.
(giat 3130, 5081/prog Harkamtibmas/SP 1).
- 7) meningkatkan penggelaran kekuatan operasional Kepolisian di kewilayahan Polda Jatim dalam pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin sinergritas polisional dengan stakeholder terkait serta menangani gangguan keamanan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan kegiatan KRYD fungsi Binmas untuk pencegahan terhadap munculnya aliran radikalisme dan anti pancasila serta kenakalan remaja dan gangguan Kamtibmas yang dapat meresahkan masyarakat;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1).
- b) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi sesuai dengan tindakan Kepolisian yang berlaku serta mengoptimalkan kekuatan personel Polda Jatim yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat



- (giat 5079, 5080, 5087/prog 4/SP 1);
- c) meningkatkan kesiapan personel di Ditsamapta Polda Jatim untuk mampu digerakan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa, dan konflik sosial;
(giat 5079, 5080, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - d) melaksanakan pelayanan pengamanan unjuk rasa damai (situasi hijau) sampai unjuk rasa menyimpang (situasi kuning) dengan mengedepankan sikap humanis dan menjunjung tinggi HAM sesuai dengan ketentuan perundangundangan;
(giat 5079, 5080, 5087/prog Harkamtibmas/SP1);
 - e) menguatkan kembali sistem rayonisasi zona back up Satwil sesuai dislokasi Kompi jajaran Satbrimob Polda Jatim guna kecepatan dalam menindak lanjuti gangguan Kamtibmas;
(giat 5087/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - f) menyiapkan pasukan sebagai Power On Hand Kapolda yang siap di gerakkan setiap saat;
(giat 3130, 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - g) meningkatkan program quick response anggota Satbrimob Polda Jatim dalam rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial;
(giat 3130, 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1).
 - h) mengoptimisasikan jumlah pasukan yang ada pada tiap Kompi jajaran untuk BKO Satwil dan menyisakan personel cadangan untuk status siaga on call
(giat 3130, 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - i) membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan yang kondusif;
(giat 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - j) memberdayakan Bhabinkamtibmas/ polisi RW untuk hadir di tengah-tengah masyarakat setiap hari guna mengajak masyarakat selalu bersatu, bersinergi dan aktif dalam giat pencegahan terhadap gangguan Kamtibmas;
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1);
 - k) meningkatkan kerjasama intansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan FGD, FKPM pembinaan jaringan Pok KKB, sosialisasi melalui DDS dengan masyarakat secara masiv;
(giat 5076, 5087/prog Harkamtibmas/SP 1).
- 8) meningkatkan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polda Jatim di seluruh wilayah Jawa Timur guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;



untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan patroli di wilayah industri (kawasan tertentu), pariwisata serta di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai dalam rangka pengamanan perairan dan penegakkan hukum di wilayah perairan Jawa Timur;
(giat 3134, 4342/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - b) peningkatan kegiatan bintibmas perairan guna menekan gangguan kamtibmas dengan memberdayakan masyarakat pesisir dalam pengamanan laut.
(giat 3135/prog 4/SP 1/SS 1).
- 9) meningkatkan penguatan Polda Jatim dibidang keamanan pada pulau berpenghuni;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas, kemacetan dan laka lantas serta obvit/obvitnas dalam rangka penguatan Polri dibidang keamanan pada pulau berpenghuni;
(giat 3130, 3131, 3135/prog Harkamtibmas/SP 1);
 - b) meningkatkan pelacakan dan penangkalan ditempat keramaian, rawan kejahatan dalam rangka penguatan Polda Jatim dibidang keamanan pulau berpenghuni;
(giat 5081/prog Harkamtibmas/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46);
 - c) membangun kemampuan kolaborasi operasional Polda Jatim dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pulau terluar dan berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (pre-emptif, preventif dan melakukan penegakan hukum awal) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah baik darat maupun laut;
(giat,3130,5087,3134/progHarkamtibmas/SP1).
- b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas ” **Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polda Jatim yang inovatif berbasis digital**”, yaitu:

- 1) modernisasi sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi guna mencapai kualitas pelayanan publik Polda Jatim;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) mengoptimalkan.....



- a) mengoptimalkan perbaikan dan pemeliharaan alat komunikasi radio dan jaringan komunikasi data guna menjangkau jaringan komunikasi antar Polsek, Polres dan Polda;
(giat 3071/prog Dukma/SP 2);
 - b) mengoptimalkan kerjasama dengan dengan instansi terkait (Pemkot Surabaya, Dishub Jatim dan PT. Telkom)
(giat 3071/prog Dukma /SP 2);
 - c) penambahan dan peningkatan kapasitas Bandwidth di Mapolda Jatim, Mako Polres dan Polsek jajaran Polda Jatim;
(giat 3071/prog Dukma /SP 2);
 - d) Melanjutkan inovasi layanan publik yang efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal;
(giat 3133, 3084/prog Harkamtibmas, prog Almatsus Sarpras Polri/ SP 2).
- 2) meningkatkan profesionalisme anggota Polda Jatim dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polda Jatim;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengoptimalkan operator (out sourcing) untuk helpdesk support aplikasi Binmas Online System (BOS);
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 2);
- b) pemanfaatan BOS V2 oleh Bhabinkamtibmas dengan kegiatan: FGD Bidang Bhabinkamtibmas serta mengembangkan kemampuan sesuai Tupoksi dan pendampingan dana desa serta pencegahan pungli di wilayah hukum Polda Jatim dan melaksanakan giat Evaluasi Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat pada penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI.
(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 2);
- c) meningkatkan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan secara berbasis IT dalam rangka penerbitan BPKB, STNK, SKCK, perizinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan perizinan di bidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial berupa implementasi pelayanan sesuai SOP dan perundangan yang berlaku;
(giat 3084, 3133/prog Almatsus Sarpras Polri, prog Harkamtibmas/SP 2);
- d) membuat sistem manajemen informasi layanan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dalam pengurusan surat ijin operasional perusahaan, pembuatan KTA satpam;



(giat 5076/prog Harkamtibmas/SP 2);

- e) Inventarisasi kebutuhan materiel SBST guna mendukung percepatan layanan kepada masyarakat sehingga produk layanan dapat langsung diterima oleh Masyarakat dan Menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan pengecekan langsung ke tempat pelayanan;
(giat 3072/prog Dukma/SP 2);
 - f) mengoptimalkan layanan unggulan Samsat MTC (MonitoringTracking Checklist) dan optimalisasi penggunaan Samsat Digital Nasional (SIGNAL) serta Optimalisasi penggunaan aplikasi SINAR (SIM online nasional) dalam pelayanan perpanjangan SIM;
(giat 3112/prog Harkamtibmas/SP 2);
 - g) Melakukan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap bulan;
(giat 3072/prog Dukma/SP 2);
 - h) meningkatkan pelayanan publik Polda Jatim dengan melaksanakan pelayanan prima dan informasi melalui aplikasi Yankes Presisi dan Rikkes berkala;
(giat 3070/prog Dukma/SP 2);
 - i) Penguatan materi “Pelayanan Publik” bagi siswa Diktuk, Prolat Fungsi Teknis Kepolisian serta Dikbangspes dengan pemanfaatan teknologi digital/IT;
(giat 3070/prog Dukma/SP 2);
 - j) melaksanakan pelatihan kompetensi secara berkala guna meningkatkan kemampuan personil dalam melaksanakan pelayanan;
(giat 3072/prog Dukma/SP 2).
 - k) mengupayakan Sarpras Pendidikan berbasis IT melalui Polda Jatim maupun Lemdiklat Polri;
(giat 3070/prog Dukma/SP 2).
- 3) mengoptimalkan “ketanggap segera” dalam melayani masyarakat sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) meningkatkan kecepatan kehadiran Samapta mendatangi TKP didukung kesiapan sarpras yang dimiliki serta dengan koordinasi satuan fungsi terkait (quick respons);
(giat 3130/prog Harkamtibmas/SP 2);

b) mengoptimall



- b) mengoptimalkan “respon time” dalam memberikan bantuan teknis Satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban;
(giat 3072/prog Dukma/SP 2);
 - c) Melaksanakan giat deteksi dini narkoba segera guna mendeteksi dampak penyalahgunaan narkoba di masyarakat;
(giat 3073/prog Dukma/SP 2).
 - d) kemudahan pemberian surat rujukan untuk FKTP ke FKTL dengan berbasis Pcare;
(giat 3073/prog Dukma/SP 2).
 - e) Melakukan penanganan bencana DVI dengan profesional dan terintegrasi.
(giat 3073/prog Dukma/SP 2).
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Menegakkan hukum secara transparan, legal, humanis, berkeadilan dan akuntabel”**, yaitu:
- 1) Peningkatan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana terhadap empat jenis kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi guna memenuhi rasa keadilan dimasyarakat Jawa Timur;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) meningkatkan dan mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta penanganan dan penegakkan hukum kasus-kasus keamanan negara terkait kejahatan: Ideologi Negara, Lingkungan Hidup, Terorisme, Korupsi Narkoba, TPPU, TPPO dan Siber;
(giat 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 5083, prog Lidik Sidik /SP 3);
 - b) melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan serta penyidikan tindak pidana terorisme sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
(giat 3143/prog Lidik Sidik/SP3);
 - c) meningkatkan kerjasama antar penegak hukum di bidang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
(giat 3141/prog Lidik Sidik/SP 3);
 - d) melakukan penyelidikan yang terfokus pada pencegahan potensi aksi radikal, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berbasis IT (siber);



(giat 3145/prog Lidik Sidik/SP 3);

- e) peningkatan koordinasi keamanan laut antar penyidik dan peningkatan penegakan hukum terhadap kejahatan di wilayah hukum perairan Jatim;
(giat 3151/prog Lidik Sidik/SP 3);
 - f) melaksanakan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan;
(giat 3130, 5083/prog Lidik Sidik/SP 3);
 - g) melanjutkan pengelolaan tahanan yang tidak melanggar HAM dan mengelola inventarisasi barang bukti secara transparan dan akuntabel
(giat 3141, 3140/prog Lidik Sidik/SP 3);
 - h) mendorong kinerja penyidik/penyidik pembantu dalam menangani perkara dengan membuat rengiat sesuai RTL yang telah dibuat;
(giat 5085/progLidik Sidik/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 96);
 - i) meningkatkan kualitas dan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegak hukum;
(giat 5086/progLidik Sidik/SP 3);
 - j) mengikutsertakan penyidik/penyidik pembantu dalam mengikuti Dikjur/Dikbang di bidang Reserse;
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 3);
 - k) melanjutkan dan meningkatkan cakupan data serta kemampuan forensik (labfor dan inafis) dalam pemeriksaan barang bukti dan pengelolaan tempat kejadian perkara (Crime Scene Investigation) melalui sertifikasi dan akreditasi;
(giat 3140, 3141/prog Lidik Sidik/SP 3);
 - l) penyelenggaraan laboratorium forensik dalam rangka bantuan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
(giat 3141/prog Lidik Sidik/SP 3).
- 2) melaksanakan pelatihan sertifikasi penyidik dalam rangka peningkatan kompetensi penyidik sesuai dengan fungsinya di era 5.0;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) Peningkatan kualitas profesi dengan mengikutsertakan penyidik/penyidik pembantu dalam mengikuti Dikjur/Dikbang sesuai fungsinya di era 5.0
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 3):



- b) Menyelenggarakan uji kompetensi jabatan dan sertifikasi pemeriksa di bidang laboratorium forensik sesuai dengan bidangnya masing-masing
(giat 3137/prog Lidik Sidik/SP 3);
 - c) Melakukan Pelatihan dan pengembangan terhadap anggota/pemeriksa sehingga menjadi terampil dan profesional dan dapat memberikan pelayanan terbaik.
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 3).
- 3) meningkatkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan peran dari wassidik guna mengawasi prses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(giat 3137, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
 - b) mempermudah akses informasi kepada masyarakat SP2HP online;
(giat 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
 - c) mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional;
(giat 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
 - d) melaksanakan penyelesaian perkara melalui perkara Restorative Justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun kepada kemanfaatan dan keadilan;
(giat 5086/prog Lidik Sidik /SP 3);
 - e) memberikan SP2HP2 agar tidak melebihi batas waktu/ time line yang sudah ditentukan kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;
(giat 3137, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
- 4) meningkatkan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal dalam rangka peningkatan pengawasan penyidikan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) mengintegrasikan



- a) mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi kriminal antar Satker Ditreskrim, Ditreskrimsus dan Ditresnarkoba Polda Jatim serta institusi penegak hukum lainnya yang mudah diakses oleh petugas dan masyarakat guna memudahkan identifikasi serta ungkap kasus kejahatan;
(giat 5083/prog Lidik Sidik/SP 3);
 - b) Mengoptimalkan e-MP (e- manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan penyidikan oerkara dan tranparansi;
(giat 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
 - c) mengoptimalkan melaksanakan Gelar Perkara
(giat 3137, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
 - d) mempermudah akses informasi terhadap SP2HP dan layanan publik secara online;
(giat 5083/prog Lidik Sidik/SP 3);
 - e) memperkuat kerangka regulasi penegakkan hukum.
(giat 5083/prog Lidik Sidik/SP 3);
 - f) mengedepankan fungsi Wassidik dalam upaya pelayanan penyidikan yang lebih baik;
(giat 5085, 5086/prog Lidik Sidik/SP 3);
 - g) meningkatkan penyelenggaraan pusat data informasi criminal yang terintegrasi antar CJS melalui SPPPT-TI (Sistem Penyelesaian Perkara Pidana Terpadu Berbasis IT).
(giat 5085/prog Lidik Sidik/SP3);
 - h) data Dakgar lantas, data laka lantas dan data ERI yang terintegrasi dengan sistem lingkungan Polri dan institusi penegak hukum;
(giat 5085/prog Lidik Sidik/SP 3);
- d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan pengelolaan SDM yang modern dan transparan serta kapasitas SDM yang cerdas, berintegrasi dan profesional”** yaitu:
- 1) Peningkatan kualitas lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era police 5.0;;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) Peningkatan kualitas lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era police 5.0;
(giat 3096/prog profesionalisme SDM Polri/SP 4);
 - b) melaksanakan.....



- b) melaksanakan seleksi bagi anggota yang akan mengikuti Diklat dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis; (giat 3096/prog profesionalisme SDM Polri/SP 4);
 - c) menyusun Standar Biaya Khusus (SBK) untuk mendukung kegiatan Operasional Pendidikan; (giat 3096, 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
 - d) meningkatkan sarana dan prasarana Pendidikan baik segi kualitas maupun kuantitas; (giat 3096/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
 - e) penguatan materi “Revolusi Mental” bagi siswa Diktuk BA Polri; (giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
 - f) mengusulkan “uji sertifikasi Profesi Gadik” guna kelayakan dan legalitas personel pada Proses Belajar Mengajar. (giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4).
- 2) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisa Beban Kinerja (ABK), Sistem Informasi Klasifikasi Kesatuan Kewilayahan (SIK3) dan pengembangan struktur organisasi Polri;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) melaksanakan pengkajian klasifikasi struktur organisasi Polda Jatim di tingkat kesatuan kewilayahan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIK3; (giat 3037/prog Dukma/SP 4);
 - b) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) disetiap satker dengan melakukan kajian kelembagaan baik bidang pembinaan maupun bidang operasional; (giat 3037/prog Dukma/SP 4);
 - c) melanjutkan penyusunan manajemen talenta persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif; (giat3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
 - d) melanjutkan penyiapan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN; (giat 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
 - e) melaksanakan penempatan personel sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. (giat 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4).
- 3) meningkatkan SDM Polda Jatim yang unggul di era police 5.0;

unt



untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) merencanakan rekrutmen PNPP sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada untuk kebutuhan organisasi secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis serta clear and clean dengan menggunakan Computer Asisted Test (CAT);
(giat 3100/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
 - b) melaksanakan rekrutmen anggota Polri secara proaktif dan terpadu berbasis TI (affirmative action, talent scouting dan reward);
(giat 3100, 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
 - c) melaksanakan seleksi Dikbang PNPP sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada untuk meningkatkan kompetensinya dengan menerapkan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis;
(giat 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
 - d) peningkatan profesionalisme SDM Polda Jatim dengan mengikutsertakan pada pelatihan IT di era police 5.0;
(giat 3096 /prog Profesionalisme SDM Polri/ SP 4);
 - e) penguatan kegiatan pembinaan Rohani, mental dan menjaga kualitas kebugaran melalui TKJ berkala.
(giat 3096 /prog Profesionalisme SDM Polri/ SP 4);
- 4) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) mengintegrasikan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) online dengan Sistem Informasi Personel Polri (SIPP) berbasis TI untuk membenahi database SDM Polda Jatim berupa pendataan ulang Polri dan PNS secara elektronik sehingga senantiasa up to date;
(giat 3096, 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
- b) penguatan sistem penilaian kompetensi Polri (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung “program manajemen talenta”;
(giat 3100, 3105, 3108, 3110/prog Profesionalisme SDM Polri /SP 4);
- c) penguatan standar penilaian kompetensi serta meningkatkan “sistem reward and punishment”;
(giat 3108/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);



- d) meningkatkan jumlah asesor sertifikasi kompetensi;
(giat 3100, 3108, 5076/prog Profesionalisme SDM Polri,
Harkamtibmas/SP 4);
- 5) meningkatkan kesejahteraan, pelayanan dan fasilitas kesehatan,
perumahan serta keselamatan bagi aparatur Polri dan keluarganya di
Polda Jatim.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:

- a) melaksanakan pelayanan administrasi pegawai berkaitan
dengan BPJS, asuransi Jamkestama dan dalam pemenuhan
perumahan ASABRI dan YKPP (Yayasan Kesejahteraan
Perumahan dan Pendidikan) bagi anggota Polri/PNS;
(giat 3072, 3105/prog Dukma, prog Profesionalisme SDM
Polri/SP 4);
- b) Melaksanakan kerja sama dengan pengembang / developer
tentang pengadaan perumahan ASABRI dan memberikan
kemudahan terkait bantuan uang muka ASABRI;
(giat 3072, 3105/prog Dukma, Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
- c) peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui
standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) oleh Komisi
Akreditasi Rumah Sakit (KARS);
(giat 3072, 5062/prog Dukma, prog Almatsus Sarpras Polri/SP
4);
- d) meningkatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, deteksi,
kuratif, rehabilitatif secara paliatif.
(giat 3072/prog Dukma/SP 4);
- e) melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak dan
pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas;
(giat 3105/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
- f) optimalisasi aplikasi e.Yankes terkait kecepatan informasi dan
pelayanan bagi;
(giat 3072/prog Dukma/SP 4);
- g) optimalisasi penyelesaian anggota yang bermasalah melalui
program BERITA (Badan Penyelesaian Permasalahan Anggota
Polri);
(giat 3105, 3107/prog Profesionalisme SDM Polri/SP 4);
- h) pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan tingkat
pertama (FKTP) dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL);
(giat 3072, 5062/prog Dukma, prog Modernisasi Almatsus
Sarpras Polri/SP 4);



- i) peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik pada tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum;
(giat 3072, 5062/prog Dukma, prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/ SP 4).
- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“pemenuhan sarana prasarana, almatsus polri dan fasilitas konstruksi polda jatim yg modern dan memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi berbasis Minimum Esensial Police Equipment (MEPE)”**, yaitu:
- 1) pemenuhan Sarpras dan perlengkapan Almatsus Polda Jatim yang modern sesuai dengan teknologi terkini guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - a) melakukan inventarisasi kondisi riil Alpalkam dan Almatsus Polda Jatim dan jajaran;
(giat 5060, 5051/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5);
 - b) melakukan evaluasi pengusulan pemenuhan kebutuhan perlengkapan Alpalkam, Almatsus dan infrastruktur TIK Polda Jatim dengan skala prioritas;
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri /SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 10, renaksi 37, 38);
 - c) mendistribusikan Alpalkam dan Almatsus sesuai dengan peruntukannya;
(giat 5059, 3084/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/IKP4 /PPK prog 4, 11, giat 9, 10, 37, 40 renaksi 34, 37, 38, 45, 115, 135, 144);
 - d) melakukan rekapitulasi pendistribusian materiil logistik dan infrastruktur TIK;
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/ IKP 4/PPK prog 4, giat 10,renaksi 37, 38);
 - e) melakukan usulan penghapusan Almatsus dan infrastruktur TIK yang kondisinya rusak berat;
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri /SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat 9, 10, renaksi 34, 39, 40);
 - f) mengajukan rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus dari satker Polda Jatim dan jajaran.
(giat 5059, 3084/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/SS 4/ IKP4//PPK prog 4, giat 10, renaksi 39, 42).
 - g) pemenuhan Almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penyelenggaraan operasional dalam



rangka penanganan PPA, penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan insujensi dan pemeliharaan keamanan;
(giat 3084, 5059, 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5);

- h) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri (Min dan Maks);
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5);
 - i) melakukan pelatihan dan pemberdayaan anggota Biddokkes dalam kesiapsiagaan dalam pengamanan PNPP maupun masyarakat di bidang kesehatan dengan peralatan kesehatan yang terkini dan modern;
(giat 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/ SP5);
 - j) Pembenahan sarana dan prasarana, SDM, jenis dan komitmen pelayanan FKTP Polri sesuai standar dan menyiapkan FKTP Polri yang terakreditasi dengan norma kapitasi dan kepesertaan tertinggi;
(giat 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5);
 - k) membangun dan mengembangkan sistem komunikasi diwilayah pulau terluar dan wilayah rawan bencana;
(giat 3084, 5059, 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5);
 - l) meningkatkan layanan darurat/Hotline Kepolisian dengan nomor tunggal (110) dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat;
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5);
 - m) revitalisasi Command Center dalam satu sistem informasi yang terintegrasi dengan CCTV Dishub, Pemkab dan Pemkot diwilayah Pemprov Jatim;
(giat 3084, 5059, 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5);
 - n) melakukan pembaruan dan peningkatan kemampuan kapasitas perangkat TIK untuk menunjang giat operasi Kepolisian di wilayah Jawa Timur.
(giat 3084, 5059, 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5).
- 2) peningkatan pemenuhan rumah dinas pegawai Polri dan pembangunan fasilitas perkantoran di Polda Jatim dan rumah dinas di wilayah pulau terluar berpenghuni;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) menginventarisir



- a) menginventarisir kebutuhan perumahan dinas dan fasilitas perkantoran;
(giat 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri /SP 5);
 - b) mengajukan rencana kebutuhan anggaran untuk pembangunan rumah dinas pegawai Polri dan fasilitas perkantoran Polda Jatim;
(giat 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5);
 - c) melanjutkan pembangunan rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya yang dekat dengan tempat tinggal personel dan masyarakat guna mendukung “Reformasi Sistem Kesehatan Nasional”;
(giat 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/ SP5);
 - d) melanjutkan pembangunan fasilitas perkantoran dan Rumdin guna mempercepat pembangunan secara selektif prioritas dan berkelanjutan;
(giat5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP5).
- 3) pembangunan dan penyatuan sistem informasi Kepolisian yang terintegrasi;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/hotline Kepolisian secara bertahap dengan nomor tunggal dalam rangka merespon dengan cepat pengaduan masyarakat;
(giat 5059/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5/);
 - b) menyediakan sarana dan prasarana yang modern dan memiliki spesifikasi serta kemampuan teknologi terkini;
(giat 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5);
 - c) membangun dan mengembangkan sistem aplikasi Kepolisian yang terpadu dan satu data Polri.
(giat 3084, 5062/prog Modernisasi Almatsus Sarpras Polri/SP 5);
- f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatkan Budaya Integritas, Akuntabilitas dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian”**, yaitu:
- 1) melanjutkan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online;
- untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) memaksimalkan.....



- a) memaksimalkan sistem Aplikasi E-Dumas Presisi dalam menindaklanjuti Dumas yang diterima dari masyarakat secara cepat dan tepat;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
 - b) memaksimalkan peranoperator untuk menindaklanjuti dan menjawab pengaduan yangmasuk melalui aplikasi dumas presisi;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
 - c) penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online (WhatsApp, Facebook, Instagram dan email) dengan pengaduan dan pelayanan Itwasda, Bidpropam dan Bagwasidik Polda Jatim;
(giat 3091, 3090, 3089, 3120/prog Dukma, prog Harkamtibmas/SP 6);
 - d) monitoring, evaluasi dan klarifikasi penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat secara terpadu;
(giat 3091, 3089, 3090/prog Dukma/SP 6);
 - e) memberikan SP2HP kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor / korban dan tersangka;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
 - f) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan wassidik guna mengontrol proses penyidikan agar berjalan dengan benar;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
 - g) mengoptimalkan dan mengIntegrasikan system penanganan pengaduan masyarakat melalui e-Dumasan;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
 - h) mengembangkan system pengawasan penyidikan secara elektronik (e-penyidikan);
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
 - i) pemasangan perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak (Software) terkait rekrutmen Pendidikan pembentukan serta terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6).
- 2) meningkatkan pencegahan korupsi di internal Polda Jatim;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) Pelaksana:



- a) Pelaksanaan asistensi pelaporan LHKPN pada aplikasi ELHKPN dan LHKASN pada aplikasi Siharka para wajib lapor di lingkungan Polda Jatim.
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
 - b) Pelaksanaan Sosialisasi dan Asistensi Perkap Nomor 8 tahun 2017 tentang LHKPN, Perkap Nomor 9 tahun 2017 tentang usaha bagi anggota Polri dan Perkap Nomor 10 tahun 2017 tentang Kepemilikan Barang Mewah Bagi Anggota Polri dan PNS Polri;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
 - c) meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;
(giat 3091/prog Dukma /SP 6);
 - d) Meningkatkan pengawasan melekat terhadap anggota Polri yang memegang jabatan operasional atau pelaksana tugas operasional;
(giat 3068, 3091/prog Dukma/SP 6/SS 5/IKP 8/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168,169);
 - e) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
 - f) melaksanakan peningkatan pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara dilingkungan Polda Jatim secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
 - g) meningkatkan kualitas pemantauan tindak lanjut dari hasil pengawasan pengelolaan keuangan negara melalui pengimplementasian monitoring dan evaluasi dengan sistem informasi yang terintegrasi;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
 - h) melaksanakan supervisi dan asistensi terkait pengelolaan keuangan Negara di Satker jajaran Polda Jatim.
(giat 3091/prog Dukma/SP 6).
- 3) meningkatkan tatakelola manajemen keuangan, perencanaan dan penganggaran Polda Jatim yang efektif, efisien dan akuntabel;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan agar tidak salah sasaran;
(giat 5051/prog Dukma/SP 6);



- b) mengidentifikasi peluang dan ancaman dalam memanfaatkan kekuatannya untuk meminimalkan kelemahannya guna meminimalisir kegagalan;
(giat 5062/prog Dukma/SP 6);
 - c) melaksanakan proses perencanaan sesuai timeline yang ada dengan mematuhi peraturan yang berlaku, dengan memperhatikan output dan outcome untuk mencapai anggaran yang berbasis kinerja;
(giat 5051/prog Dukma/SP 6);
 - d) meningkatkan sinergitas dalam menyusun produk perencanaan Polda Jatim guna mensikronisasi pembangunan di Polda Jatim agar semakin berkualitas;
(giat 5051/prog Dukma/SP 6);
 - e) melaksanakan dan meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri Semester dan Tahunan;
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
 - f) melaksanakan Analisa dan Evaluasi setiap kegiatan baik dibidang operasional dan pembinaan, sebagai tolak ukur pelaksanaan tugas Kepolisian.
(giat 3091/prog Dukma/SP 6);
- 4) Menata kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri yang efektif dan efisien;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- a) Melaksanakan pengkajian klasifikasi struktur organisasi Polda Jatim di tingkat kesatuan kewilayahan dengan mengoptimalkan pengimputan data dalam aplikasi SIK3);
(giat 5052/prog Dukma/SP 6);
 - b) Mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan DSP disetiap Satker dengan melakukan kajian kelembagaan baik bidang pembinaan maupun operasional;
(giat 5052/prog Dukma/SP 6).
- 5) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri di lingkungan Polda Jatim.;;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a) Mengusulk



- a) Mengusulkan seluruh Satwil bisa terkoneksi dgn SIPP (Kemenpan) agar peningkatan pelayanan publik termonitor keseluruhan;
(giat 5053/prog Dukma/SP 6);
- b) Mengusulkan Satker dan Personil yang berpredikat WBK/WBBM dan Inovator Yanlik untuk mendapatkan Reward berupa penghargaan atau pendidikan dll;
(giat 5053/prog Dukma/SP 6);
- c) monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan Kepolisian pada pelayanan publik;
(giat 5053/prog Dukma/SP 6);
- d) terus mendorong Satker berinovasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan pelayanan publik di wilayahnya.
(giat 5053/prog Dukma/SP 6);

2. Arah Kebijakan Polres Sampang

Melanjutkan pemantapan pelayanan publik Polres Sampang yang profesional, responsif dan terpadu sampai tingkat layanan kepolisian terjauh dengan membuka akses seluas-luasnya dengan sistem layanan eletronik dari Polres sampai Polsek yang terintegrasi. Tidak terlepas dari upaya meningkatkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum Polres Sampang yang transparan dengan asas berkeadilan

- a. Arah kebijakan, Polres Sampang 2025 dikembangkan dengan memperhatikan arah kebijakan nasional tentang keamanan dan ketertiban dalam negeri, serta arah kebijakan dan strategi Polres Sampang 2025-2029. Sementara itu, sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya, kerangka kinerja dalam Polres Sampang merupakan bentuk turunan langsung dari kerangka kinerja Polda Jatim sebagai organisasi payung. Dengan demikian, arah kebijakan Polres Sampang sewajarnya mengacu kepada arah kebijakan Polda Jatim.

(A) Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Hukum Polres Sampang

- 1). Pencegahan aksi terorisme, radikalisme, dan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan masyarakat

- (a). Memetakan potensi aksi terorisme, radikalisme, konflik social dan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya;

(b) Melakukan



- (b) Melakukan penyelidikan dan penyuluhan yang terfokus kepada pencegahan potensi aksi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya;
- (c) Mengoptimalkan pengamanan area perairan daerah hukum Polres Sampang;
- (d) Mengoptimalkan penanggulangan aksi terorisme, aksi radikal, dan konflik sosial lainnya;
- (e) Memperkuat sinergi dengan para penyelenggara fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri;
- (f) Membangun regulasi yang efektif dan efisien dalam memberikan efek jera bagi para pelaku aksi terorisme, aksi radikal, dan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.

2). Pencegahan penyebaran hoax dan ujaran kebencian melalui media sosial yang berpotensi meresahkan masyarakat

- (a). Meningkatkan proses literasi digital dan manajemen media social;
- (b) Menetralisir berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu Kamtibmas.

3). Peningkatan kesadaran masyarakat dalam disiplin berlalu lintas

- (a). Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam berlalu lintas;
- (b) Meningkatkan patroli polisi di beberapa wilayah Sampang;
- (c) Meningkatkan hukuman pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara bermotor;
- (d) Memberantas penyalahgunaan fasilitas umum berupa jalan raya oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

4). Penghentian konflik antar warga dengan melibatkan peran masyarakat dan komunitas (*Community Policing*)

- (a). Memberdayakan masyarakat melalui program polisi masyarakat yang efektif dan efisien;
- (b) Meningkatkan peran dan koordinasi dengan pihak terkait dalam mengelola kerukunan antar masyarakat;
- (c) Meningkatkan pembinaan masyarakat desa/kelurahan;
- (d) Mengoptimalkan edukasi dan pencegahan konflik berbasis masyarakat;

(e) Meningkatkan



- (e) Meningkatkan pembinaan polisi khusus pada lembaga-lembaga yang harus memiliki Polsus;

5).Penjagaan terhadap kestabilan keamanan masyarakat.

- (a). Meningkatkan kesadaran dalam menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat di Wilayah Sampang (Kecamatan dan Kelurahan/Desa);
- (b) Meningkatkan fungsi Pos Polisi dalam upaya menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat hingga pada ruang lingkup pemerintahan terkecil.

6).Pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA di wilayah Polres Sampang

- (a). Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan program-program dan pelaksanaan pencegahan penggunaan narkoba;
- (b) Meningkatkan proses terapi dan rehabilitasi bagi para pecandu dan penyalahgunaan narkoba;
- (c) Meningkatkan penegak hukum agar meningkatkan keberanian menghukum mereka yang terlibat;
- (d) Meningkatkan penegak hukum agar meningkatkan keberanian menghukum para penjahat NAPZA;
- (e) Meningkatkan proses menemukannya modus-modus peredaran baru dalam penyelundupan narkoba;
- (f) Meningkatkan pemantauan identitas masyarakat secara menyeluruh di seluruh wilayah.

(B) Penegakan Hukum Secara Berkeadilan.

1).Peningkatan pengungkapan kasus secara objektif dan transparan kepada Publik atau Pihak Terkait

- (a). Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Penyidik;
- (b) Meningkatkan kerjasama dengan Pihak Terkait.

(C) Profesionalisme SDM Polres Sampang.

1) Peningkatan Kualitas SDM Polres Sampang

(a). Menyelenggara'



(a). Menyelenggarakan Sytem *reward and punishment* kepada personel Polres Sampang secara Objektif.

2) Mengakomodir Administrasi Personel Dan Kegiatan Pembinaan Pada Polres Sampang

- (a) Mengolah Data Sistem Informasi Personel Polri (SIPP);
- (b) Mendata dan Memproses kenaikan Pangkat PPNP Polres Sampang;
- (c) Melaksanakan Penilaian SMK Polri Pada PPNP Polres d)
- (d) Melaksanakan Kegiatan Binrohtal Rutin;
- (e) Mengkomulir dan Mendata Proses Izin Kawin, Rujuk Dan Cerai;
- (f) Memproses Pengusulan KTA Elektronik Bagi PNPP Polres Sampang;
- (g) Memproses penerbitan KPI/KPS bagi anggota polri dan karis/karsu bagi PNS Polri;
- (h) Memproses penerbitan usulan tanhor SI 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, 32 tahun dan BBN Bagi anggota polri SI 10 Tahun, 20 Tahun, dan 30 Tahun Bagi PNS Polri;
- (i) Mendata dan Memproses Kenaikan Gaji Berkala;
- (j) Terselenggaranya Pengakhiran masa dinas Personel tepat waktu;
- (k) Mendata dan Memproses Syarat Tes Psikologi pinjam pakai senpi pada Personel Polres Sampang;
- (l) Pembinaan Fisik Olahraga Umum dan Latihan Beladiri Polri;
- (m) Program Indeks Masa Tubuh/Over Weight;
- (n) Melaksanakan Tes Kesamaptaan Jasmani;
- (o) Melaksanakan Tes Ujian Beladiri Polri Semester;
- (p) Melaksanakan Latihan dan Ujian Beladiri polri Bagi personel yang UKP
- (q) Terselenggaranya Panitia Bantuan Penerimaan Anggota Polri dengan mengacu pada Zona Integritas;
- (r) Peningkatan Kemampuan Anggota pada Setiap Fungsi Melalui Latkat puan TOT.

(D) Modernisasi Teknologi Polres Sampang.

1).Menyediakan data dan informasi berbasis media yang *user friendly*

(a). Menyediakan



- (a). Menyediakan data dan informasi yang mudah diakses untuk kebutuhan keterbukaan informasi publik kepada media dan masyarakat di beberapa alat akses;
- (b) Mengelola berita atau informasi negatif yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (c) Memperkuat pengelolaan data operasional Polres Sampang dalam satu sistem pengelolaan data terpusat.

2).Menyediakan sarana dan prasarana Polres yang modern dan berbasis teknologi terkini

- (a). Memetakan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai skala prioritas;
- (b) Meningkatkan akses informasi yang akurat;
- (c) Meningkatkan sistem penanganan masalah;
- (d) Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan public.

(E) Sistem Pengawasan Polres Sampang Yang Akuntabel Guna Mendukung Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih Dan Melayani.

1).Peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat

- (a). Meningkatkan inovasi pelayanan publik Polres;
- (b) Meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan SDM Polres dalam berbagai acara sosial kemasyarakatan;
- (c) Meningkatkan kemudahan pelayanan data dan informasi.

2).Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien

- (a). Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (b) Meningkatkan kualitas perencanaan secara efektif dan efisien.

3).Reformasi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Polres

- (a). Membangun sistem penerapan nilai-nilai dan kode etik Polres;
- (b) Meningkatkan manajemen kinerja Polres;
- (c) Meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polres yang andal;
- (d) Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);



- (e) Monitoring dan evaluasi tata laksana Polres Sampang;
- (f) Penataan organisasi tingkat Polres Sampang;
- (g) Mengusulkan pembentukan Polsek pra rural menjadi rural (Polsek Karang Penang dan Polsek Pangarengan);
- (h) Pembinaan sistem dan metode manajemen tata laksana organisasi.

4).Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif

- (a). Penguatan regulasi;
- (b) Penanganan *public complaint* secara efektif dan terpercaya.

5).Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Polres Sampang

- (a). Meningkatkan inovasi pelayanan publik berbasis TIK;
- (b) Meningkatkan cakupan layanan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat;
- (c) Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan *up to date*;
- (d) Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan.

BAB IV.....



BAB IV
PROGRAM KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF

1. Program dan Kegiatan Polres Sampang TA. 2025

a. program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

1) Tujuan:

Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b) penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c) penindakan tindak pidana umum;
- d) penindakan tindak pidana Narkoba;
- e) penindakan tindak pidana korupsi;
- f) penindakan tindak pidana Lalu Lintas.

b. program modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri;

1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional.

2) Kegiatan:

- a) dukungan manajemen dan teknis Sarpras.

c. program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;

1) Tujuan:

Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi Kepolisian serta kerja sama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif.

2) Kegiatan:

- a) analisis keamanan;
- b) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik;
- c) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi;



- d) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya;
 - e) penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara;
 - f) dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - g) pembinaan pelayanan fungsi Samapta;
 - h) penyelenggaraan pengamanan objek vital;
 - i) peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas;
 - j) pembinaan potensi keamanan;
 - k) pembinaan operasional pemeliharaan keamanan;
 - l) pengendalian operasi kepolisian;
- e. program dukungan manajemen;

1) Tujuan:

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.

2) Kegiatan:

- a) penerangan masyarakat;
- b) dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
- c) pertanggungjawaban profesi;
- d) penyelenggaraan pengamanan internal Polri;
- e) penegakan tata tertib dan disiplin Polri;
- f) penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan;
- g) kerjasama dan penyuluhan hukum;
- h) reformasi birokrasi Polri;
- i) manajemen anggaran;

2. Pagu Indikatif Polres Sampang TA 2025

- a. Kebutuhan Anggaran Polres Sampang T.A. 2025 sebesar **Rp. 65.451.294.000,-** (Enam Puluh Lima Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah) dengan rincian komposisi kebutuhan anggaran sebagai berikut:

- 1) rincian Pagu Indikatif Polres Sampang T.A. 2025 per Jenis Belanja sebagai berikut:

- a) Belanja Pegawai : Rp. 45.835.098.000,-;
- b) Belanja Barang : Rp. 19.616.196.000,-;
- c) Belanja Modal : Rp. 0,-.



- 2) rincian Pagu Indikatif T.A. 2025 per sumber anggaran sebagai berikut:
 - a) Rupiah Murni : Rp. 63.440.497.000,-;
 - b) PNBP : Rp. 2.010.797.000,-;
 - c) BLU : Rp. 0,-;
 - 3) Rincian Pagu Indikatif T.A. 2025 per Program sebagai berikut:
 - a) Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Rp. 2.321.353.000,-;
 - b) Modernisasi Almatsus Dan Sarana Prasarana Polri Rp. 6.627.670.000,-;
 - c) Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Rp. 9.891.141.000,-;
 - d) Dukungan Manajemen Rp. 46.611.130.000,-.
- b. kegiatan yang berdasarkan usulan Pagu Indikatif Polres Sampang T.A. 2025 :
- 1) mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja, pemenuhan *Intake* Polri tahun 2025, namun Pagu Indikatif ini belum termasuk untuk penambahan tunjangan kinerja sampai dengan 80%;
 - 2) mendukung kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: biaya pemeliharaan, BMP, pemeliharaan dan perawatan *Command*
 - 3) *Center*, kebutuhan *werving* Diktuk daya dan jasa serta keperluan perkantoran);
 - 4) kegiatan fungsi teknis kepolisian, berupa: deteksi potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, korupsi, Narkoba perdagangan orang, keamanan dalam negeri, Kamtibmas, keamanan laut, kejahatan siber dan penegakan hukum lainnya dan pengamanan tahapan Pemilu 2024;
 - 5) mendukung penguatan sarana prasarana dalam rangka peningkatan profesionalisme SDM Polda Jatim, meningkatkan pelayanan publik Polda Jatim, penanganan gejala/konflik sosial, penanganan kasus menonjol, separatisme/KKB, terorisme, berita hoaks dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, penanganan peristiwa yang berimplikasi kontinjensi, pemenuhan fasilitas Polri dan pemenuhan fasilitas Brimob serta pembangunan perumahan dan kesehatan bagi personel Polda Jatim;
 - 6) melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Polri, baik di bidang fungsi pembinaan maupun operasional agar semakin Promoter dan Presisi;



- 7) meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif secara maksimal dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas melalui strategi Polmas dalam menghadapi ancaman gangguan kamtibmas;
- 8) meningkatkan kegiatan keamanan laut pada poros maritim dengan memperkuat satuan Polair baik di tingkat Polda Jatim maupun kewilayahan;
- 9) meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas serta
- 10) di wilayah Jawa Timur dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional;
- 11) melaksanakan sosialisasi, penyusunan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Polda Jatim serta pemberian advokasi terhadap institusi Polri, anggota Polda Jatim maupun keluarga Polda Jatim;
- 12) mengakomodir kegiatan Program Prioritas Kapolri yang terdiri dari:
 - a) penataan kelembagaan;
 - b) perubahan sistem dan metode organisasi;
 - c) menjadikan SDM Polri yang unggul di era *Police 4.0*;
 - d) perubahan teknologi kepolisian modern di era *Police 4.0*;
 - e) pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas;
 - f) peningkatan kinerja penegakan hukum;
 - g) pemantapan dukungan Polri dalam penanganan *Covid-19* (PC);
 - h) pemulihan ekonomi nasional (PEN);
 - i) menjamin keamanan dan program prioritas nasional;
 - j) penguatan penanganan konflik sosial;
 - k) peningkatan kualitas pelayanan publik Polri;
 - l) mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegritas;
 - m) pemantapan komunikasi publik;
 - n) pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan;
 - o) penguatan fungsi pengawasan;
 - p) pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (*public complaint*).



BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Polres Sampang tahun 2025 ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Polres Sampang beserta jajarannya sebagai acuan dalam rangka penyusunan Pagu Definitif TA 2025 Polres Sampang sehingga dapat terwujud kesamaan persepsi dan tindakan untuk mencapai sasaran tugas secara optimal .

Ditetapkan di: Sampang
pada tanggal: 31 Januari 2025

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SAMPANG POLDA JATIM

